



Jateng
gayeng

CAPAIAN PROGRAM PUS TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TENGAH



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

PROGRAM PUS PASCA 2015

2000 – 2015
(Deklarasi Dakar,
Sinegal)



6 Target PUS


**Akan
dilanjutkan**

2016 – 2030,
(Deklarasi Incheon,
Korsel)

**dengan
7 (Tujuh)
Target/Goals**



**Pendidikan 2030: Menuju Pendidikan
dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
untuk Semua yang Inklusif, Adil dan
Bermutu)**

	MDGs	EFA	SDG4
Ruang lingkup	Pendidikan Dasar (anak usia sekolah)	Pendidikan Dasar (anak usia sekolah, pemuda dan orang dewasa)	Pendidikan dasar + pasca Pendidikan dasar menggunakan persefektif pembelajaran sepanjang hayat
Cakupan geografis	Ditujukan bagi negara berpenghasilan rendah (<i>low-income countries</i>); negara-negara konflik	Universal tapi diutamakan negara berpenghasilan rendah (<i>lower-income countries</i>)	Diperuntukkan bagi semua negara (agenda universal)
Proses oleh	PBB	PBB	Negara Anggota
Fokus kebijakan	Akses dan pemenuhan penuntasan Pendidikan dasar untuk semua (Wajar Dikdas)	Akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua	Akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua + akses yang merata terhadap pasca pendidikan dasar + relevan (sesuai) dengan kebutuhan pasar kerja
Jumlah target	2	6 tujuan	10 



Lanjutan 1 :

GOALS	URAIAN	TARGET
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang	11
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	8
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara	10
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	10
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	11
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	5
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	10

Lanjutan 2 :

Goals	Uraian	Target
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	12
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akutanbel, dan inklusif di seluruh tingkatan	12
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	19

THE 'UNFINISHED' EFA AGENDA DALAM TPB-4

TARGET 4.1 Menjamin bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan menengah (12 tahun)

TARGET 4.2 Menjamin bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas

TARGET 4.3 Menjamin kesetaraan gender diseluruh jenjang pendidikan

TARGET 4.4 Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu (15 – 24 tahun), memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Perpres 59 Tahun 2017



Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019; dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (Perpres No.59 Tahun 2017)

1. Gubernur bersama Bupati/Walikota harus menyusun RAD-TPB 5 (lima) tahunan.
2. Berpedoman pada: Sasaran, Target dan Indikator Pelaksanaan TPB Nasional; dan Prioritas pembangunan daerah.
3. Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. Disampaikan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri
5. Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
6. Gubernur mengkoordinasi pelaksanaan RAD-TPB dengan seluruh Bupati dan Walikota.
7. Gubernur wajib melibatkan wakil dari OMS, Filantropi dan Bisnis, dan Akademisi

Peran yang diharapkan dari Pemerintah Daerah

1. Dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan program;
2. Pemetaan dan integrasi target dan indikator nasional TPB ke dalam RPJMD;
3. Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan TPB;
4. Sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi;
5. Persiapan data dan informasi;
6. Kerjasama antara Pemda dalam perencanaan dan pelaksanaan TPB;
7. Penyusunan dan pelaksanaan RAD-TPB tingkat provinsi bersama kabupaten/kota;
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB.

Peran yang diharapkan dari Perguruan Tinggi

1. Menjadi pusat unggulan (***center of excellence***).
2. Mendukung Pemda dan pemangku kepentingan daerah.
3. Mendukung secara akademis pengembangan berbagai indikator yang belum jelas (*missing indicator*).
4. Menjadi mitra kerja Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun landasan regulasi dan RAD TPB/SDGs.
5. Menjadi mitra kerja Pemerintah untuk melakukan *midterm review* RPJMN 2015-2019.
6. Menjadi mitra Pemerintah dan Pemda, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan implementasi hingga monitoring dan evaluasi.

Indikator TPB-4 dalam Perpres No.59/2017 (1)

Tujuan Global	Sasaran Nasional 2015-2019	Instansi Pelaksana
<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif</p>	<p>1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).</p>	
	<p>1.3 Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).</p>	
	<p>1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).</p>	
	<p>1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).</p>	
	<p>1.6 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).</p>	
	<p>1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).</p>	

Indikator TPB-4 dalam Perpres No.59/2017 (2)

Tujuan Global	Sasaran Nasional 2015-2019	Instansi Pelaksana
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator TPB-4 dalam Perpres No.59/2017 (3)

Tujuan Global	Sasaran Nasional 2015-2019	Instansi Pelaksana
<p>Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p>	<p>3.1 Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>3.2 Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>

Indikator TPB-4 dalam Perpres No.59/2017 (4)

Tujuan Global	Sasaran Nasional 2015-2019	Instansi Pelaksana
<p>Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p>	<p>4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.</p>	
	<p>4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019.</p>	
	<p>4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>

Indikator TPB-4 dalam Perpres No.59/2017 (5)

Tujuan Global	Sasaran Nasional 2015-2019	Instansi Pelaksana
<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	<p>5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
	<p>5.2 Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15- 59 tahun pada tahun 2019.</p>	

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Program Indonesia Pintar
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK
4. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Kebekerjaan
7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan
8. Peningkatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental
9. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan
10. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

Sasaran Prioritas Nasional Pendidikan

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 Tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,7 Tahun	8,8 tahun
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1 (2013)	94,8	95,1	95,4	95,8	96,1
Prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B	50,4 (2013)	60,0	70,0	78,0	84,0	95
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7	73,9	76,5	79,0	81,6	84,2
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5	68,7	71,8	74,8	77,9	81,0
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5	77,2	79,1	80,9	82,8	84,6
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2	53,8	56,6	59,4	62,2	65,0
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90	0,92	0,94	0,95	0,96
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,08	0,16	0,18	0,22	0,24
Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV	n.a.	n.a.	75	80	85	90
Nilai Test PISA dan Ranking	(2012)					
-Matematika	375	386	n.a.	n.a.	427; 50	n.a.
-- Sains	382	403	n.a.	n.a.	438; 50	n.a.
-Membaca	396	397	n.a.	n.a.	446; 45	n.a.



**MENUJU PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA
YANG INKLUSIF, ADIL DAN BERMUTU
TAHUN 2016 – 2030**

1. Pada tahun 2030, sedikitnya x% anak perempuan dan laki-laki siap memasuki pendidikan dasar melalui keikutsertaan di pendidikan dan perawatan anak usia dini, termasuk setidaknya satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar yang bebas biaya dan wajib, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan.

- ▶ **APK PAUD/TK (4-6 thn)**
- ▶ **APK PAUD (0 – 6 thn) (*belum masuk calon indikator dalam indikator Provinsi SDGs*)**
- ▶ **% lembaga PAUD yang terakreditasi (*belum masuk calon indikator dalam indikator provinsi SDGs*)**

KETUA : PP Paud dan Dikmas

Anggota : Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK Provinsi, Kemenag, LPMP, Dispermasdesdukcapil

2. Pada tahun 2030, seluruh anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan wajib pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan memperoleh hasil pembelajaran yang relevan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang paling terpinggirkan.

1. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI
2. Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs
3. Persentase ruang kelas SD/MI yang sesuai SNP
4. Persentase ruang kelas SMP/MTs yang sesuai SNP
5. Rasio APK Perempuan/laki-laki di SD/MI/SDLB/Paket A (BPS-Susenas)
6. Rasio APK Perempuan/laki-laki di SMP/SMPLB/MTs/Paket B (BPS-Susenas)

Ketua : BPS

Anggota : PP Paud dan Dikmas, Kemenag

3. Pada tahun 2030, semua remaja dan sedikitnya x% orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kemampuan keaksaraan dan berhitung yang memadai untuk dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif di masyarakat, dengan mengutamakan anak perempuan dan perempuan serta mereka yang terpinggirkan.

1. Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM
2. Rata – rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun (BPS)
3. Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15 – 59 tahun (BPS)
4. Rata – rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (BPS)

Ketua : Kemenag

Anggota : PP Paud dan Dikmas, PKK Provinsi

4. Pada tahun 2030, sedikitnya $x\%$ remaja dan $y\%$ orang dewasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak melalui pendidikan menengah, pendidikan tinggi, teknik dan kejuruan, serta kursus dan pelatihan, dengan mengutamakan kesetaraan gender dan mereka yang terpinggirkan.

1. Angka kelulusan SMA/MA/SMK
2. Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK yang sesuai SNP
3. Rasio APK Perempuan/laki-laki di SMA/SMALB/MA/Paket C (BPS)
4. Jumlah Lembaga Ketrampilan
5. Jumlah kapasitas Lembaga Ketrampilan
6. Jumlah output Lembaga Ketrampilan yang masuk pada dudi

Ketua : Disdikbud

Anggota : Disnakertrans, Disperindag, Kemenag, Dp3akbdaldu, Dinas Sosial

5. Pada tahun 2030, memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan global dan pembangunan pendidikan berkelanjutan.

1. Jumlah pengelola SID yang dilatih
2. Persen output lembaga pelatihan yang diterima di pekerjaan (dudi)

Ketua : Disnakertrans

Anggota : Disdikbud, Dispermasdesdukcapil, Kemenag, Disperindag

6. Pada tahun 2030, semua pemerintah memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas, terlatih secara profesional, termotivasi dan didukung dengan baik

1. Persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4
2. Persentase pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4
3. Persentase pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4
4. Persentase pendidik SMA/MA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4

Ketua : Disdikbud

Anggota : Kemenag, PP Paud & Dikmas, LPMP

7. Pada tahun 2030, semua negara mengalokasikan sedikitnya 4-6 persen dari *produk domestik bruto* (PDB) atau 15-20 persen dari belanja publik untuk pendidikan, dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat kerjasama keuangan untuk pendidikan dengan memprioritaskan negara yang paling membutuhkan.

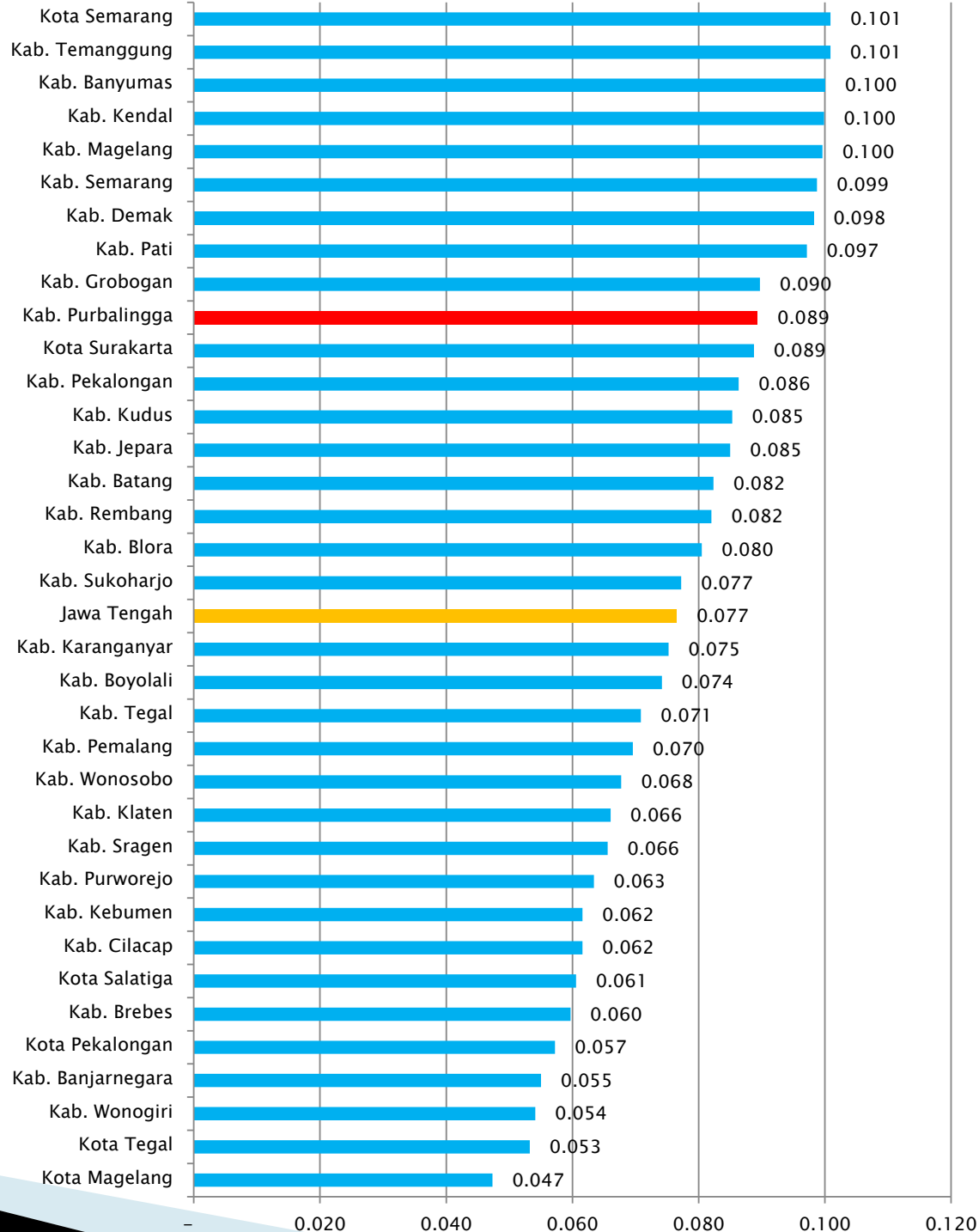
1. Persentase anggaran pendidikan terhadap APBD Provinsi
2. Jumlah Kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan 15%-20% dari belanja publik
3. Jumlah siswa SMA/SMK penerima bantuan siswa miskin
4. Jumlah siswa dari keluarga miskin yang memiliki prestasi bagus
5. Jumlah bantuan sarpras sekolah yang rusak berat, sedang, ringan untuk SMA/SMK

Ketua : BAPPEDA

ANGGOTA : Disdikbud, Kemenag, Disnakertrans, Disperindag, Kemenag, Dp3akbdaldu, Dinas Sosial, LPMP, PP PAUD dan Dikmas, BKKBN, Dinas Kesehatan, PKK Provinsi

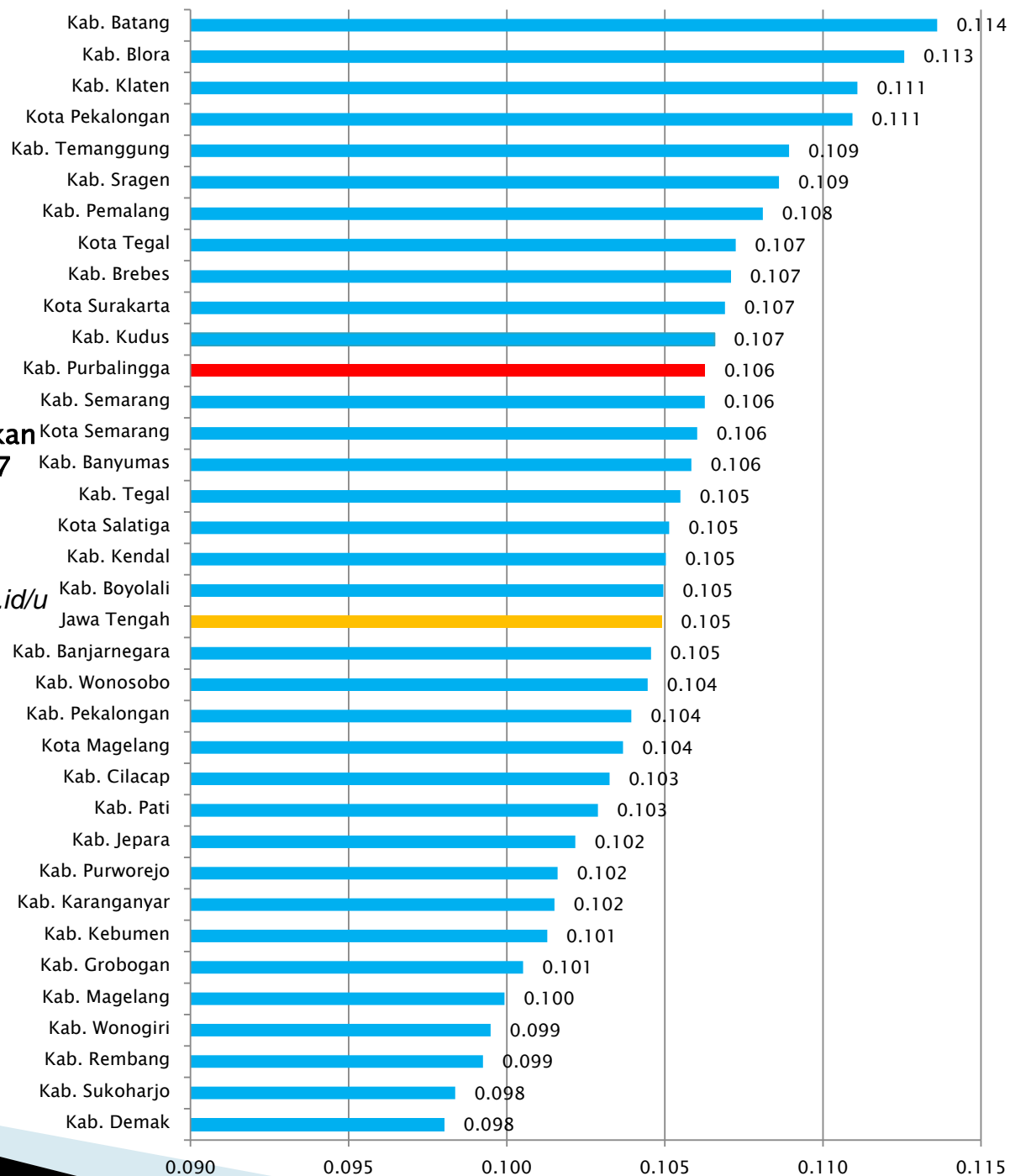
Grafik 1
APK PAUD Sederajat P. 3–6 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

Sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



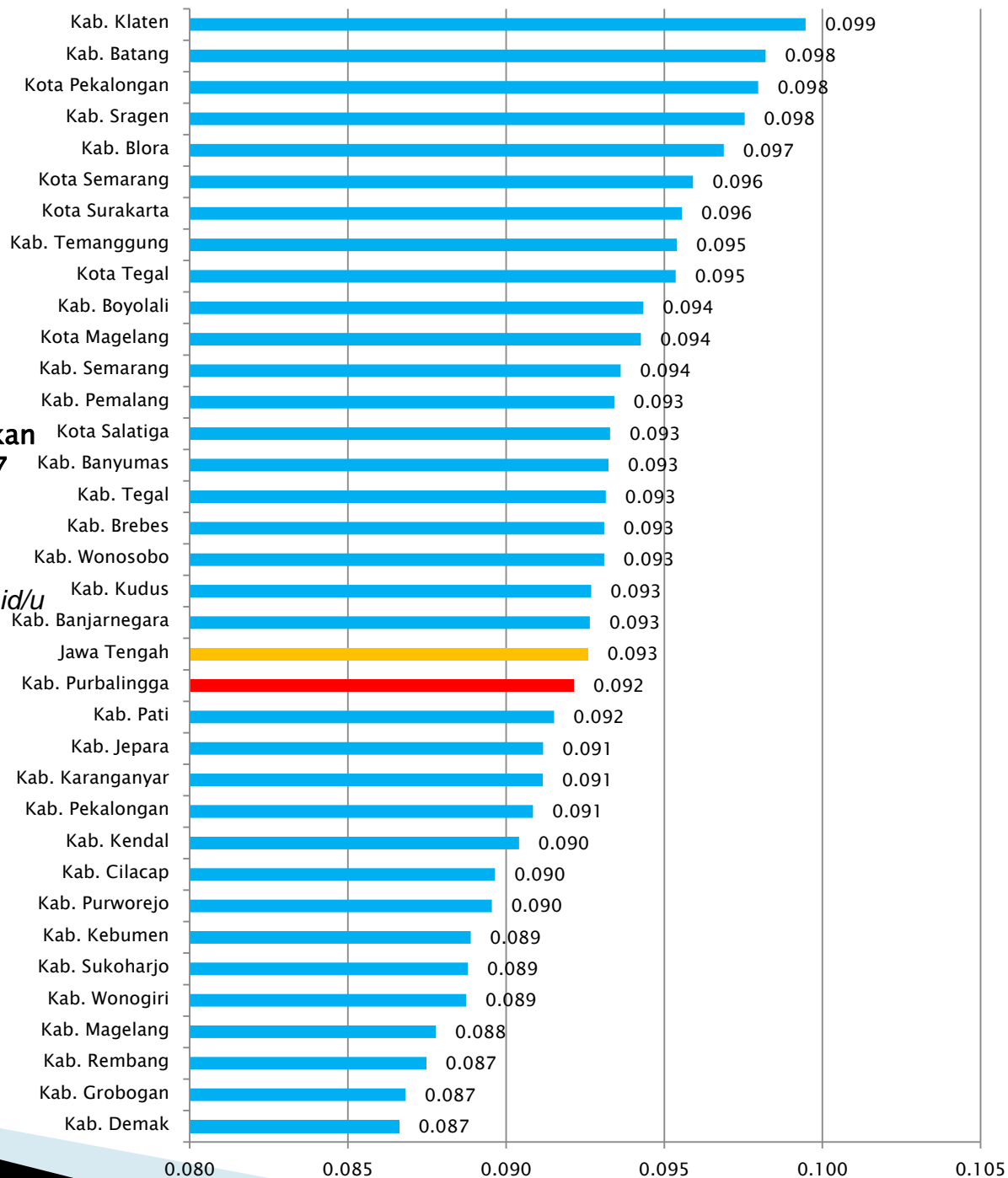
Grafik 2
APK SD Sederajat P. 7–12 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

Sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



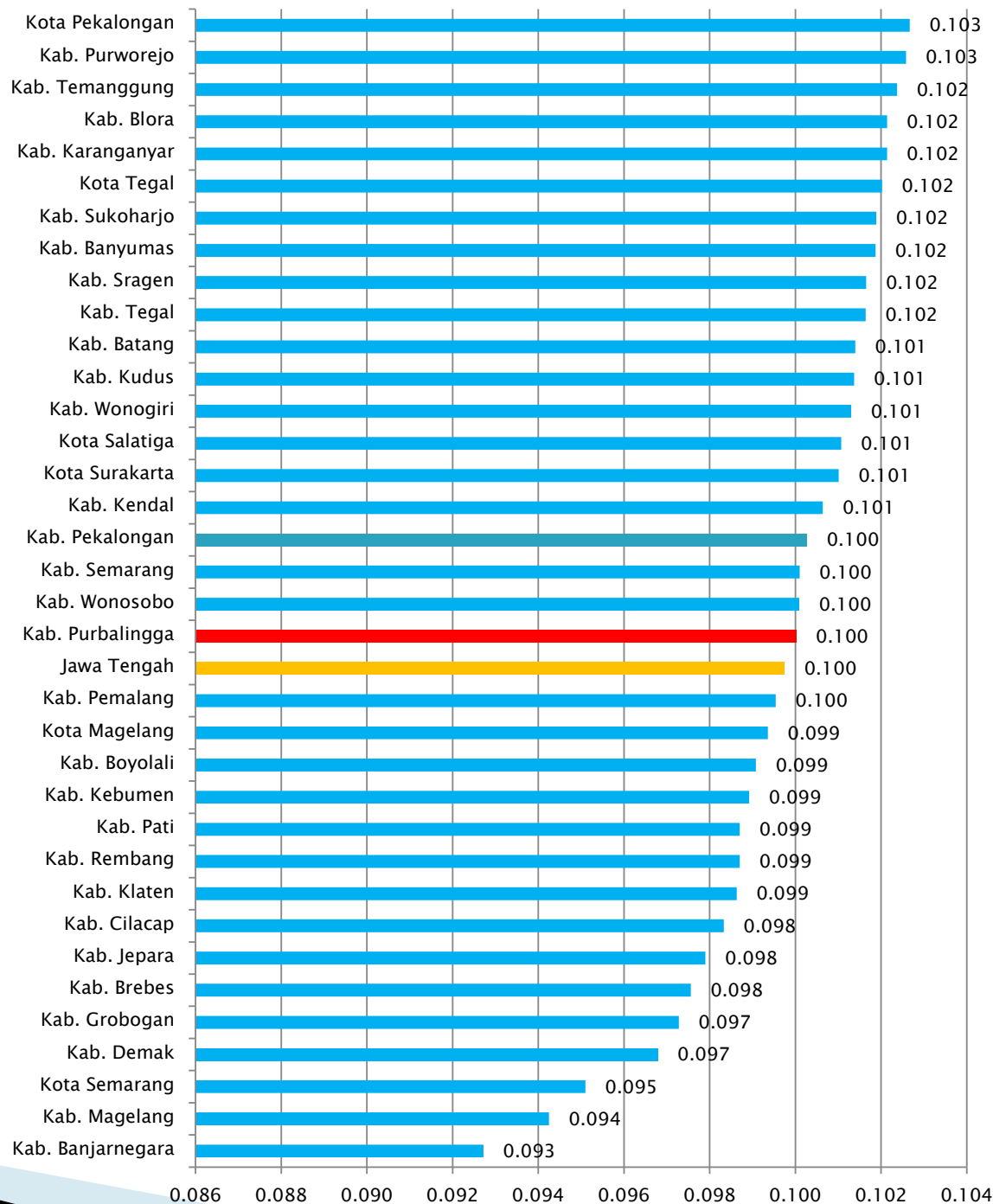
Grafik 3
APM SD Sederajat P. 7–12 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

Sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



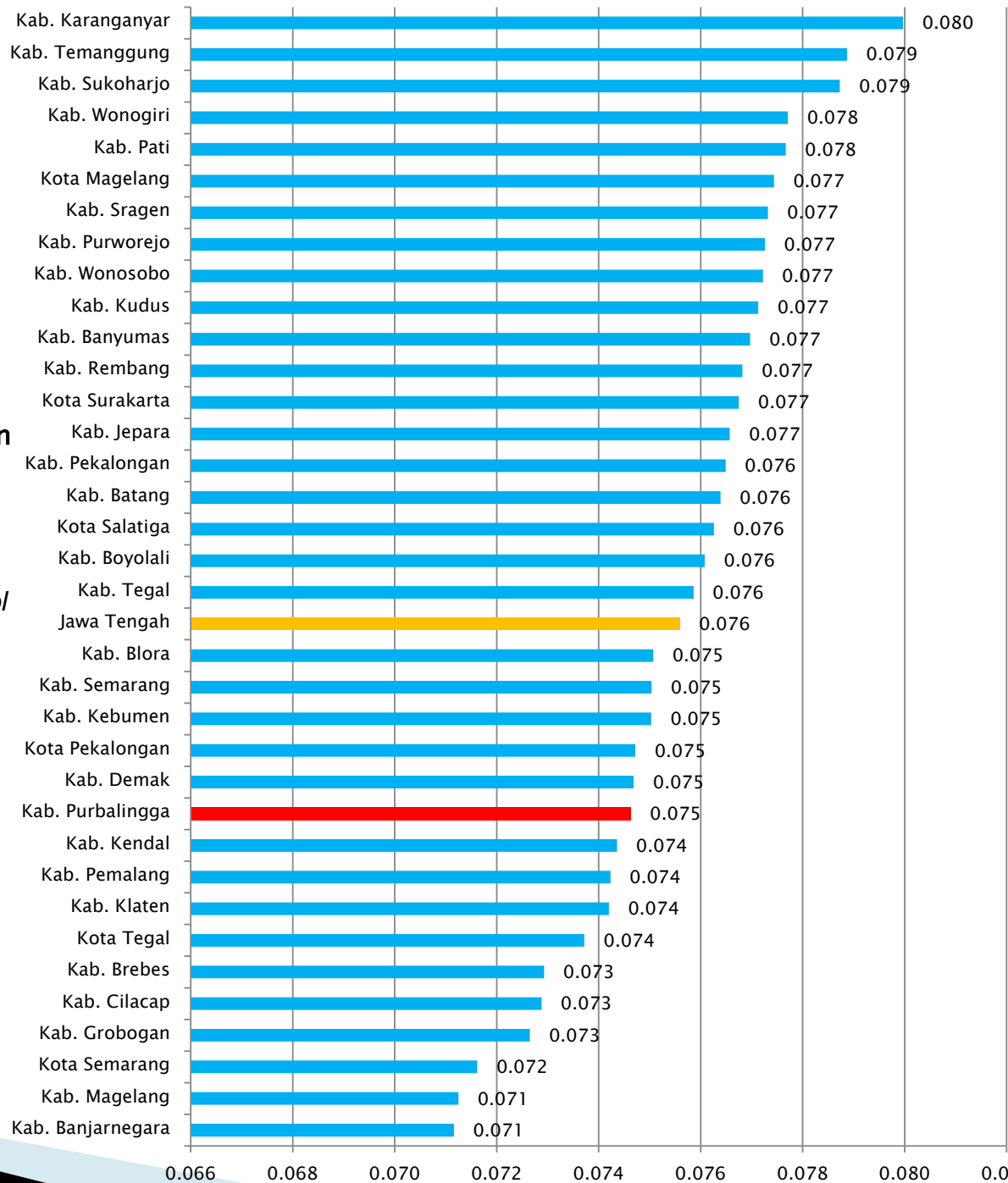
Grafik 4
APK SMP Sederajat P. 13–15 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



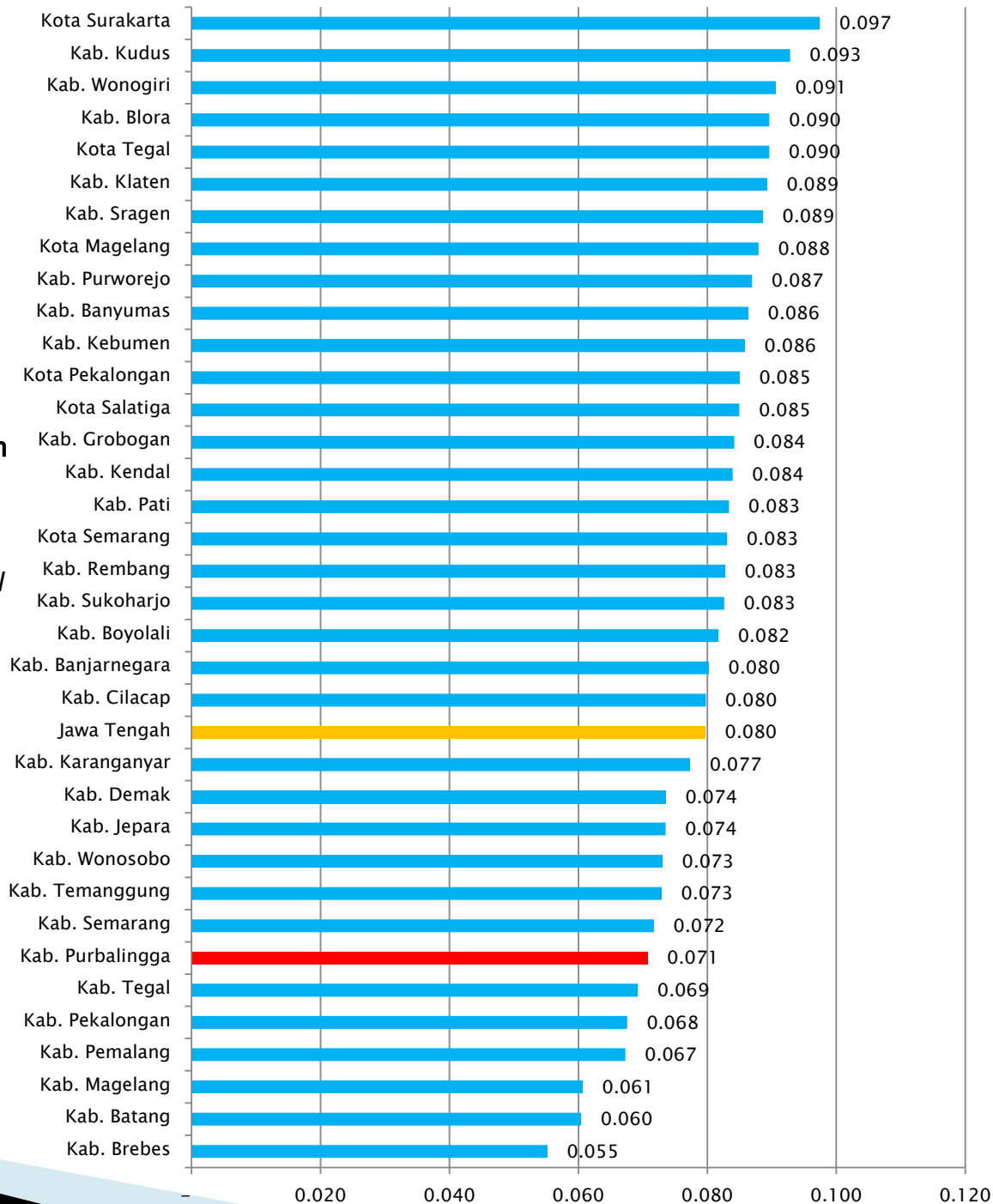
Grafik 5
APM SMP Sederajat P. 13–15 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



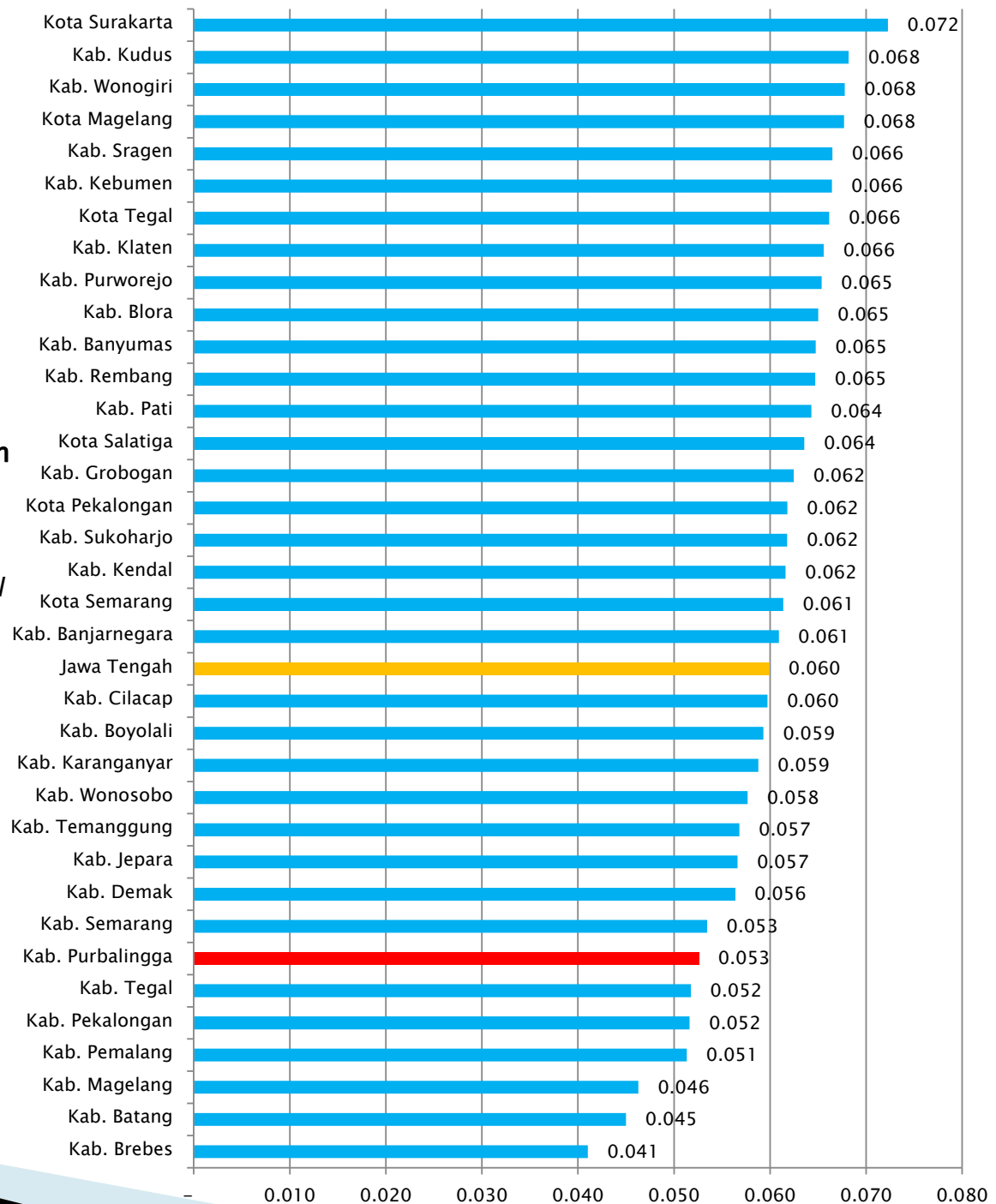
Grafik 6
APK SMA Sederajat P. 16–18 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/Dir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



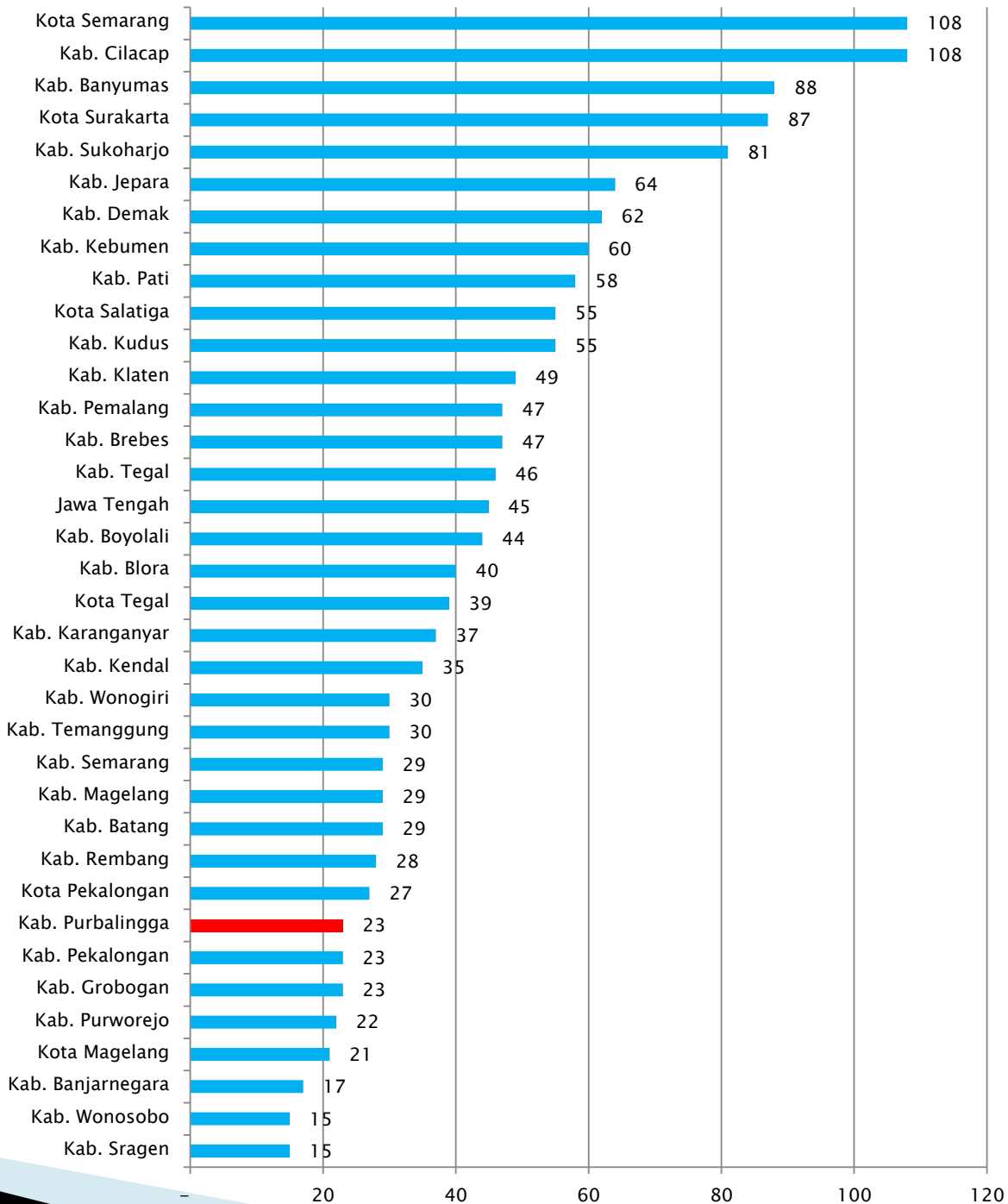
Grafik 7
APM SMA Sederajat P. 16–18 th Berdasarkan
Peringkat Provinsi Jawa Tengah 2017

sumber: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_37D50EB0-4057-44D7-847D-9AFDF46DD105_.pdf



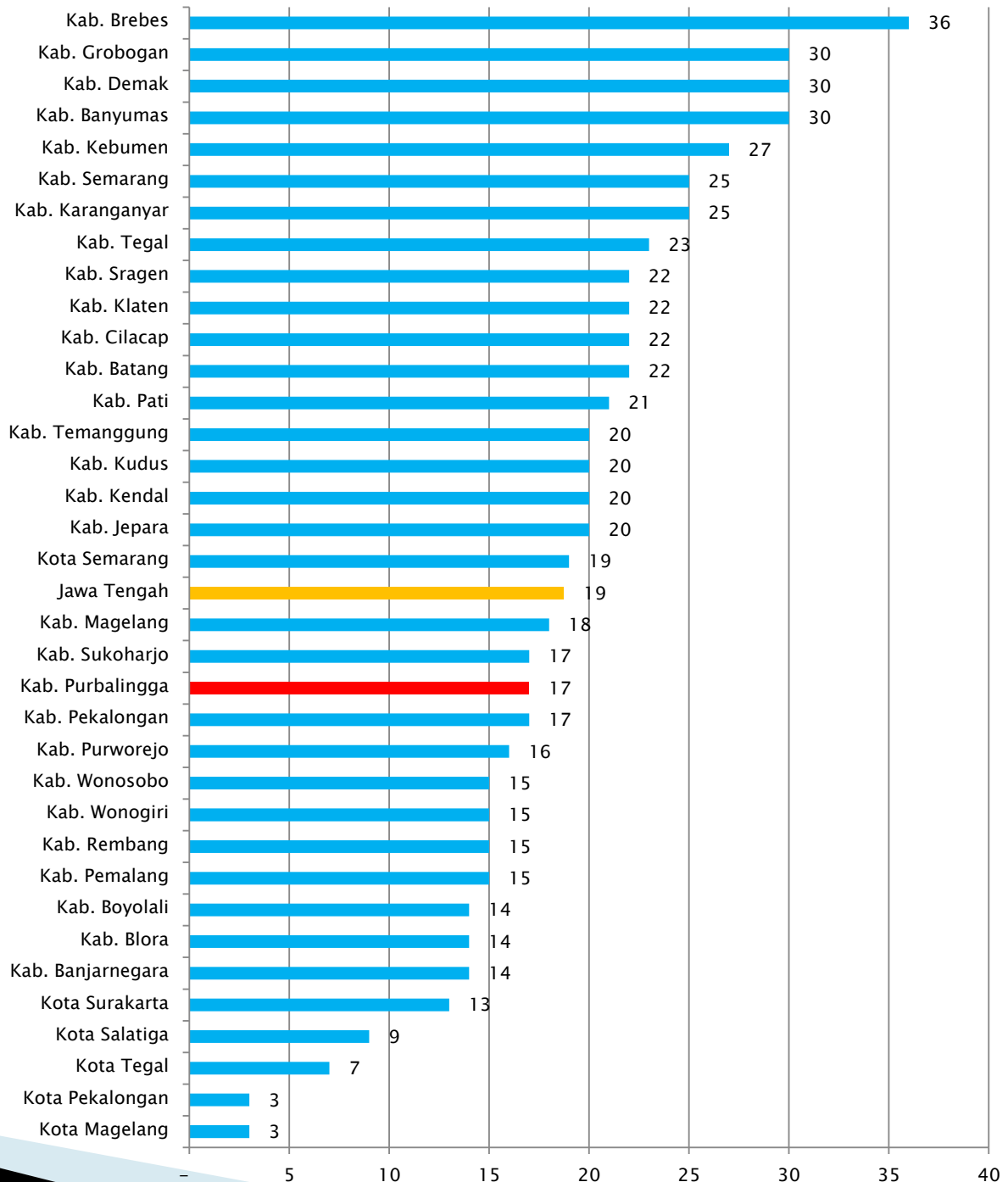
Grafik 8
LKP Terverifikasi Berdasarkan Peringkat
Provinsi Jawa Tengah 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



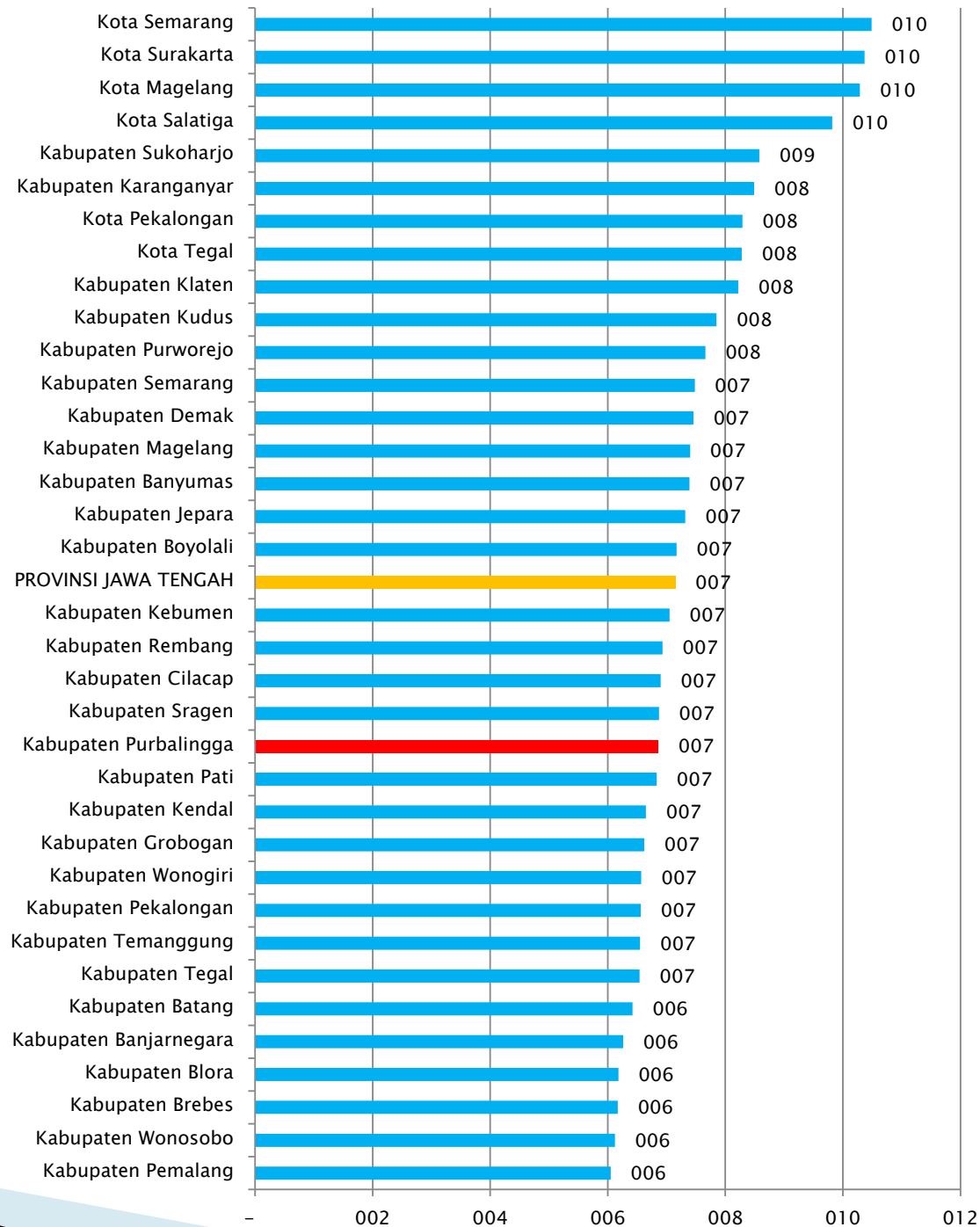
Grafik 9
Jumlah PKBM Berdasarkan Peringkat
Provinsi Jawa Tengah 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



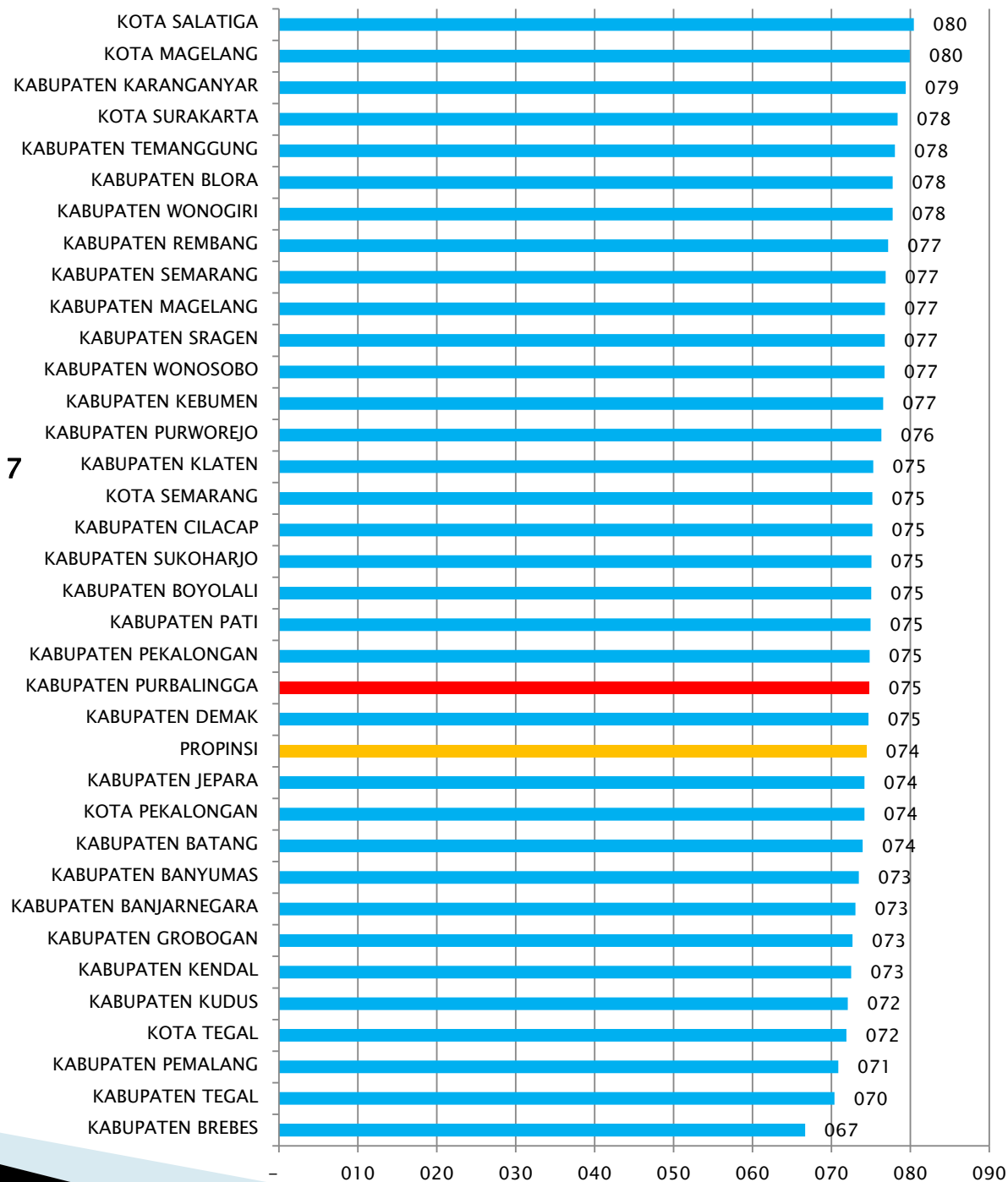
Grafik 10
Rata2 Lama Sekolah Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/37>



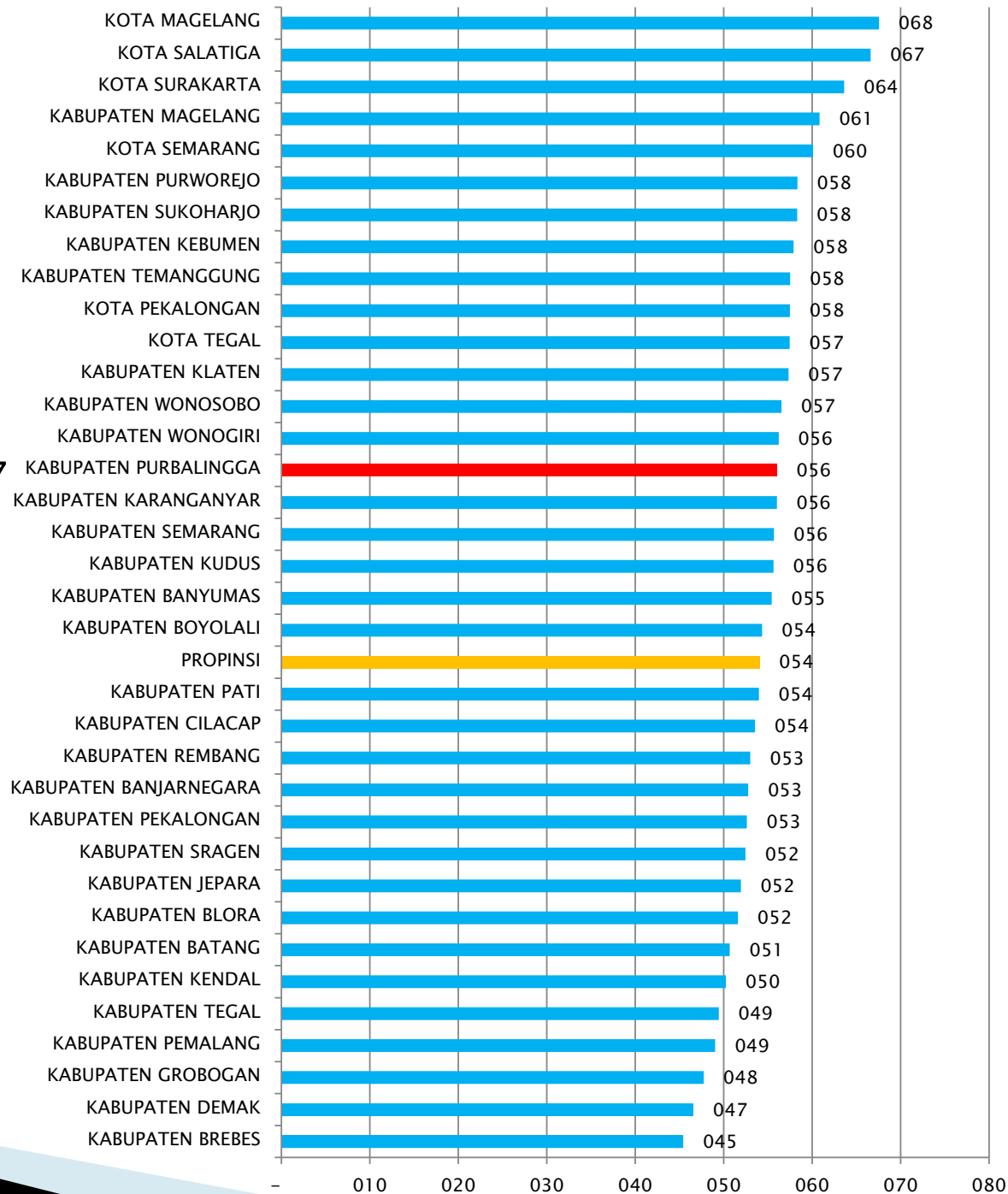
Grafik 11
Rata2 Nilai Ujian SD/MI
Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



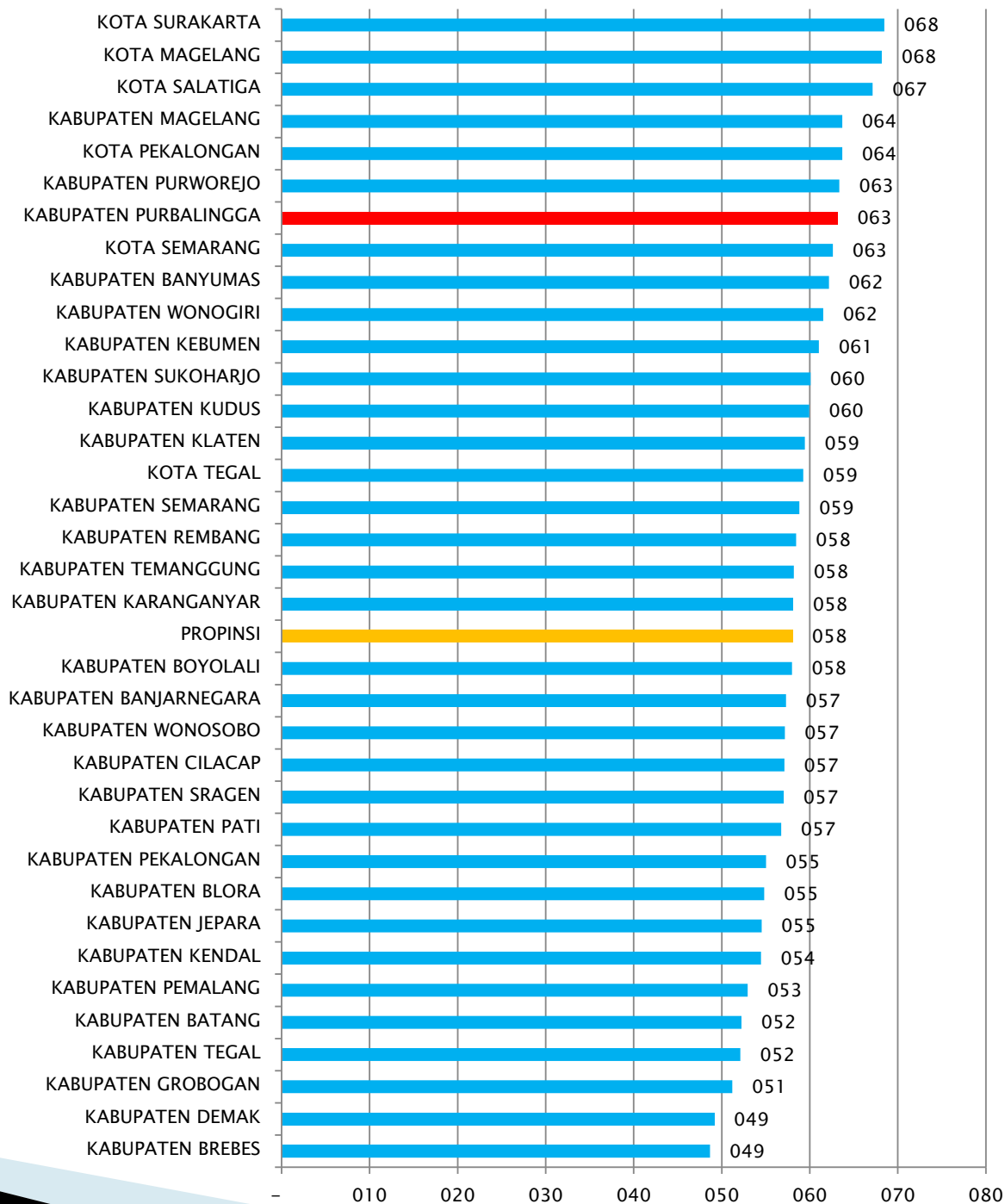
Grafik 12
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP SMP/MTs
Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



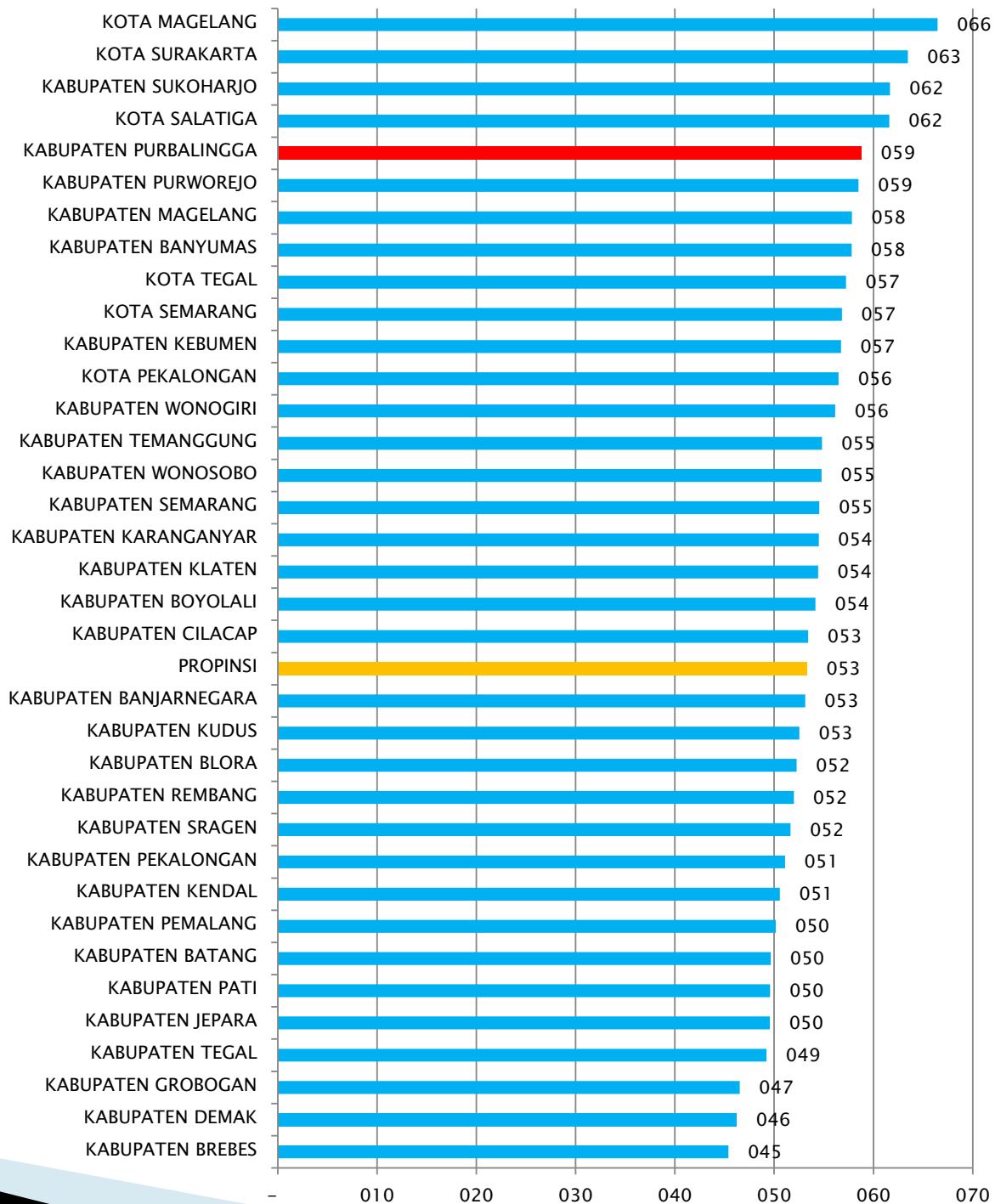
Grafik 13
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
SMA/MA (IPA) Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



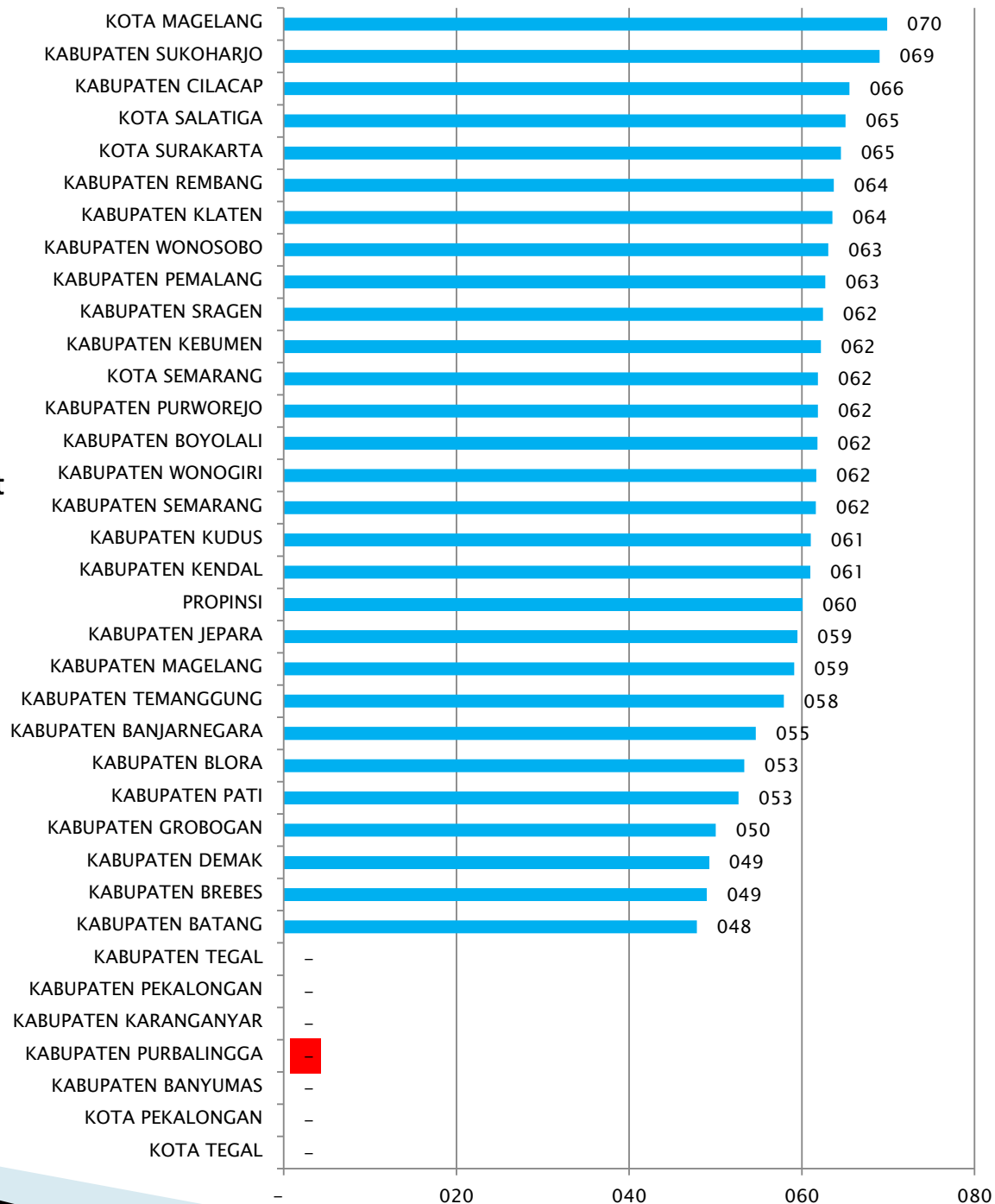
Grafik 14
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
SMA/MA (IPS) Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



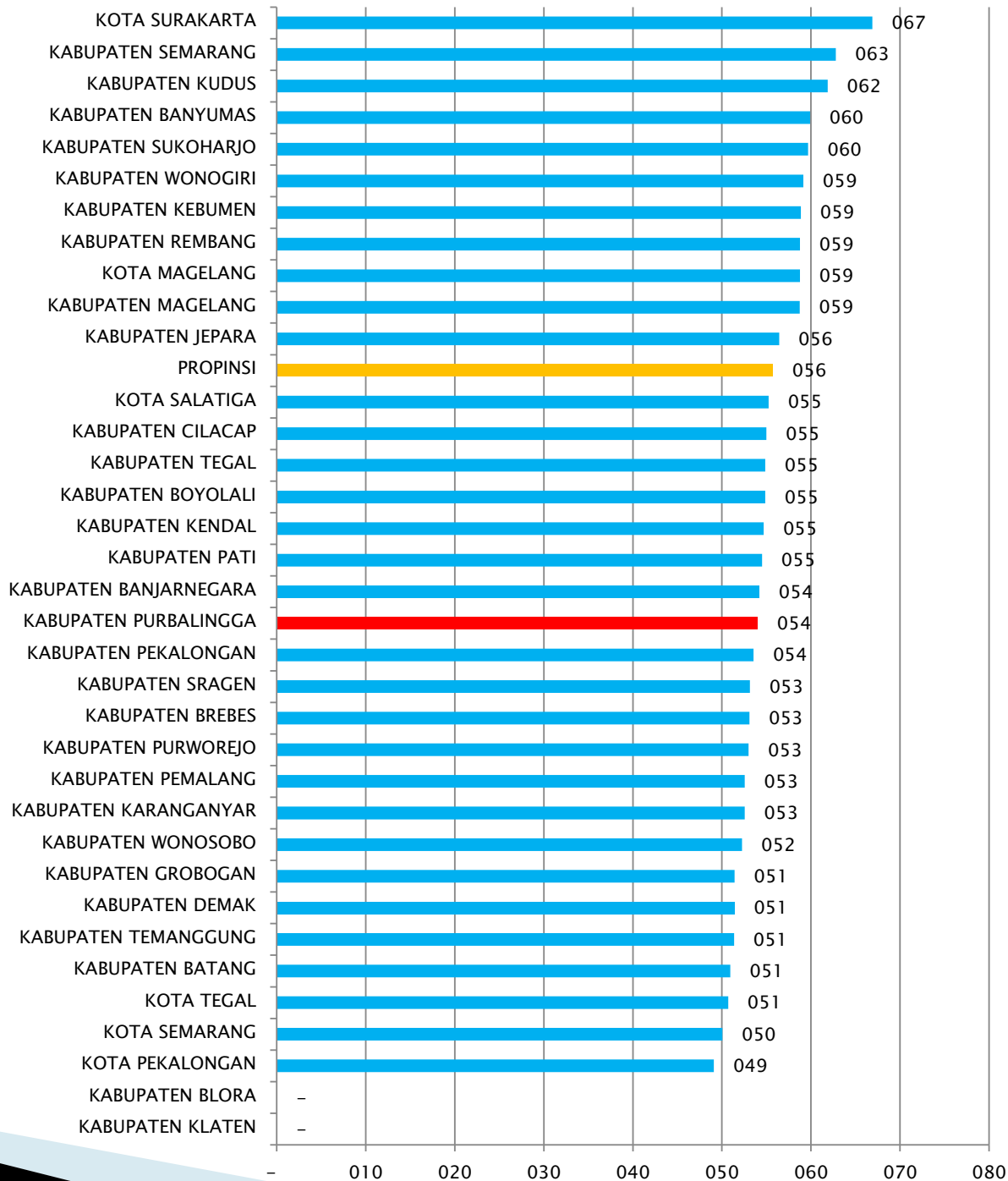
Grafik 15
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
SMA/MA (Bahasa) Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



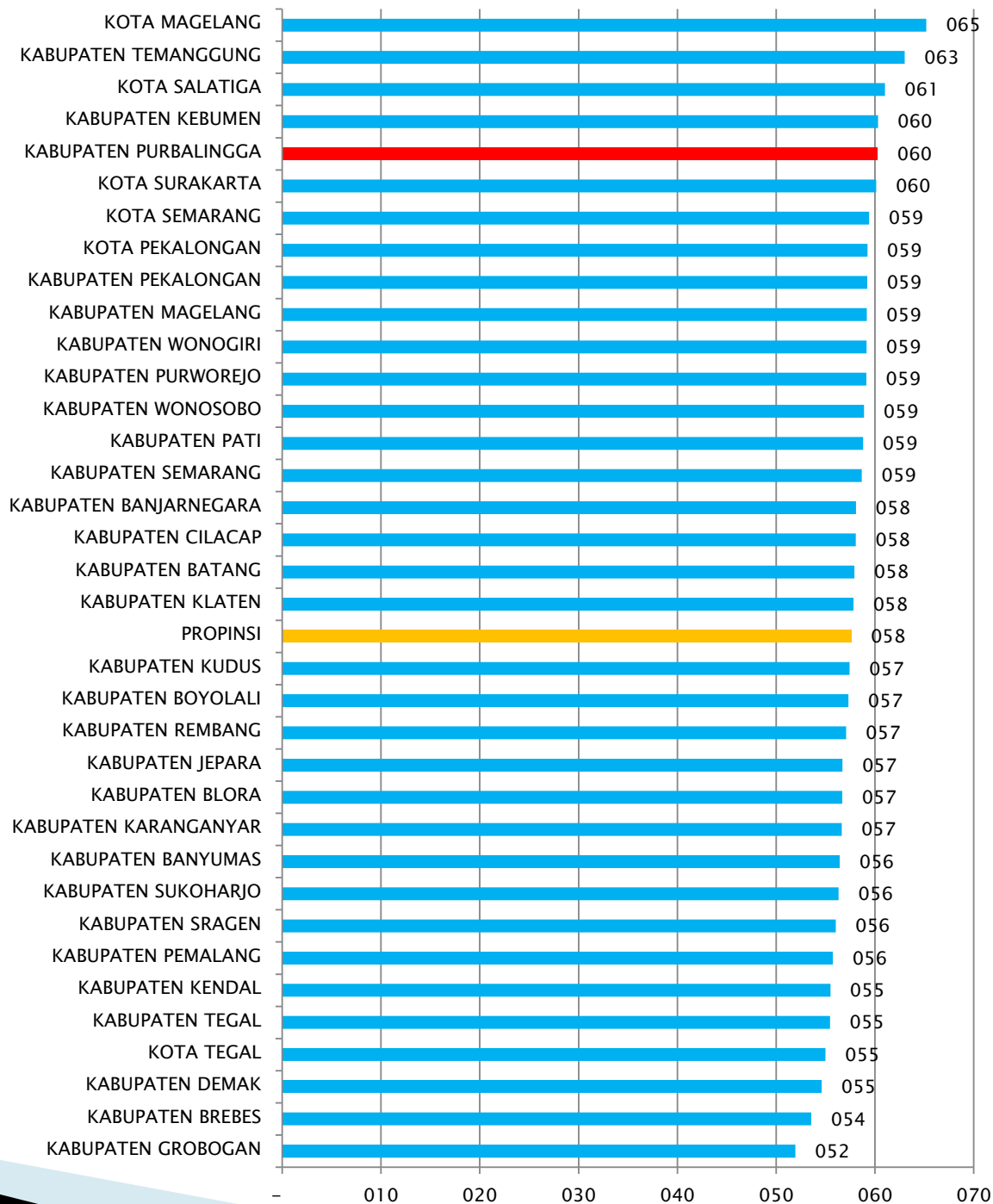
Grafik 16
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
MA (Agama) Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



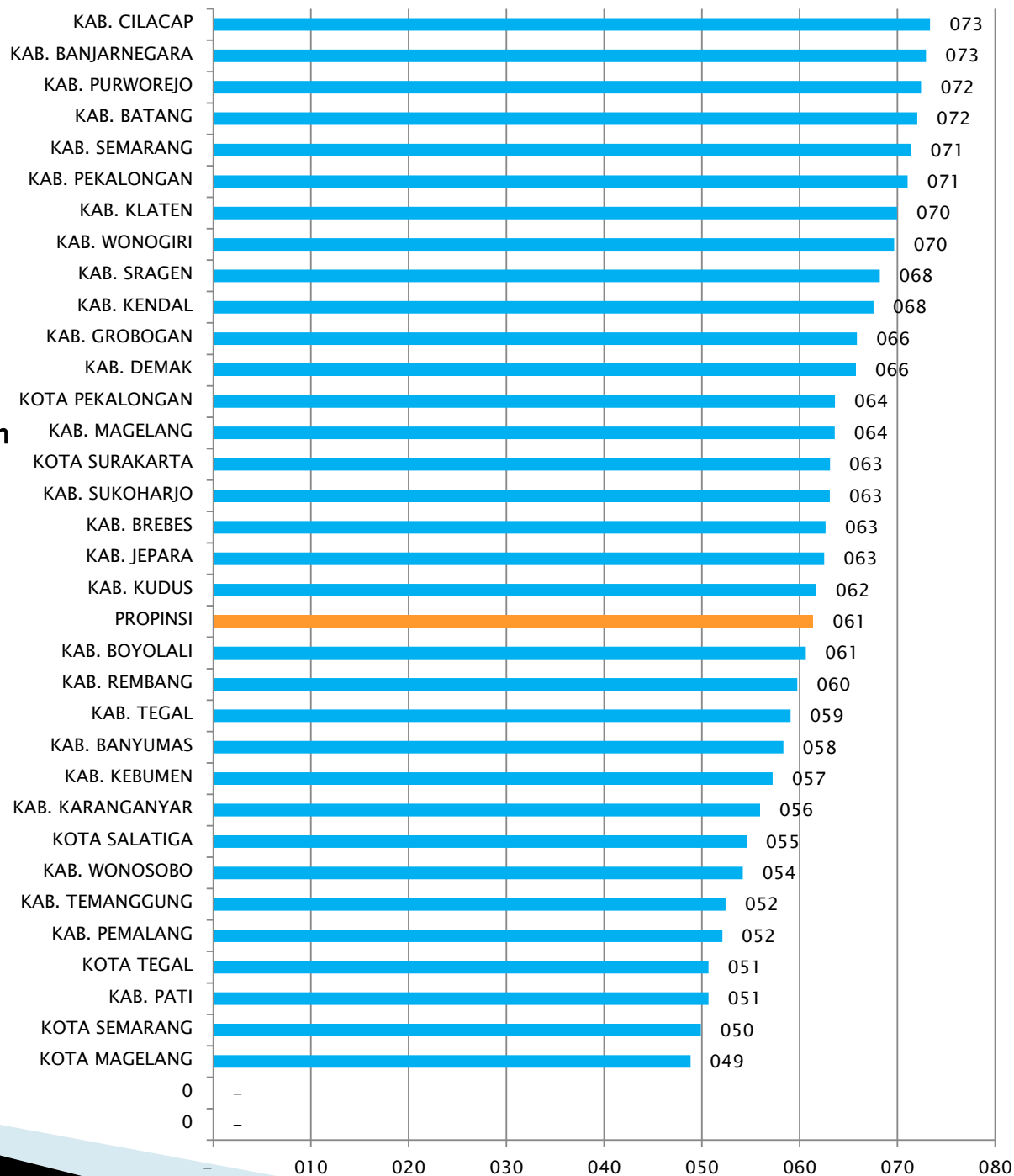
Grafik 17
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP SMK
Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



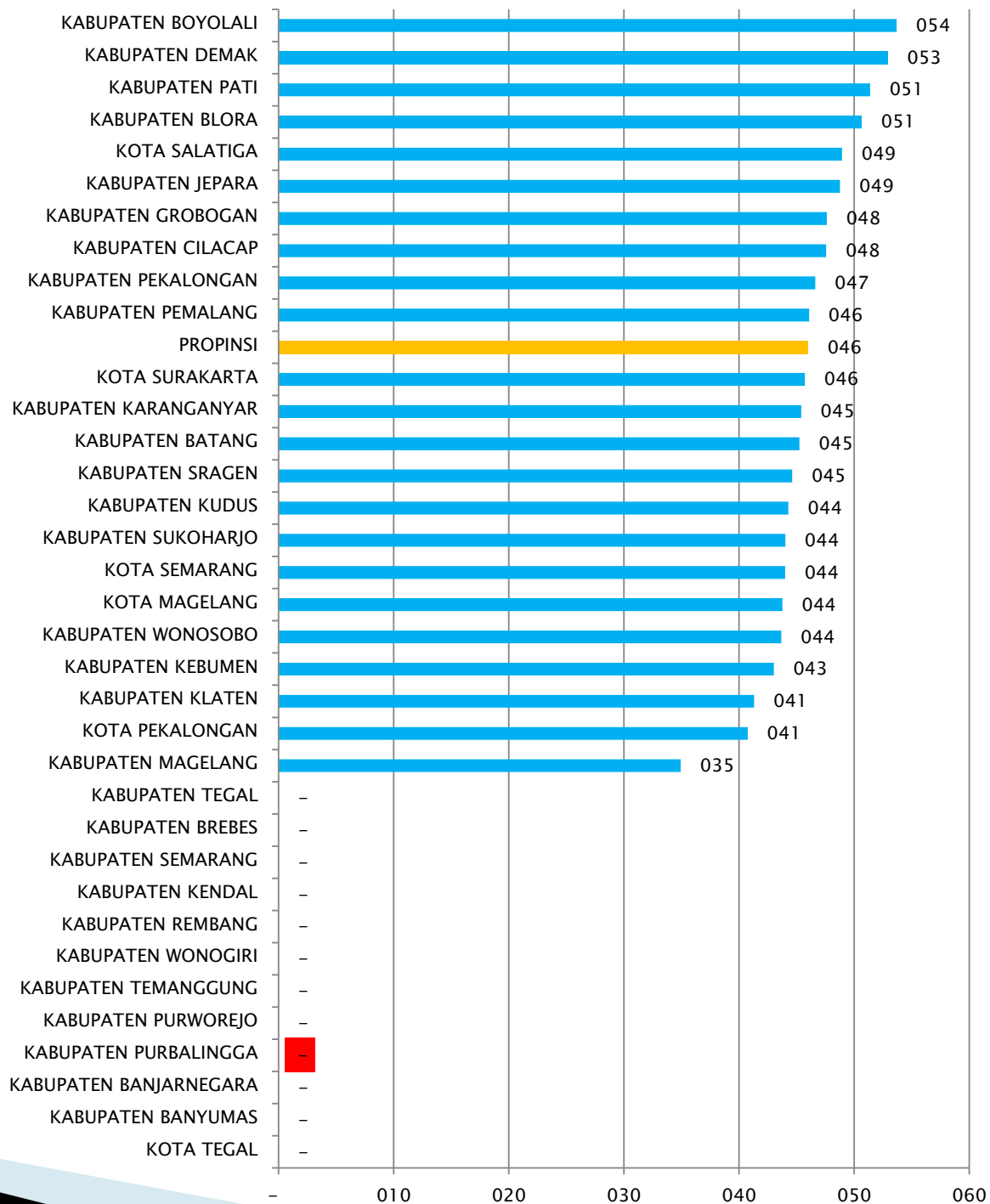
Grafik 18
Rata2 Nilai Paket A/Ula Berdasarkan
Peringkat Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



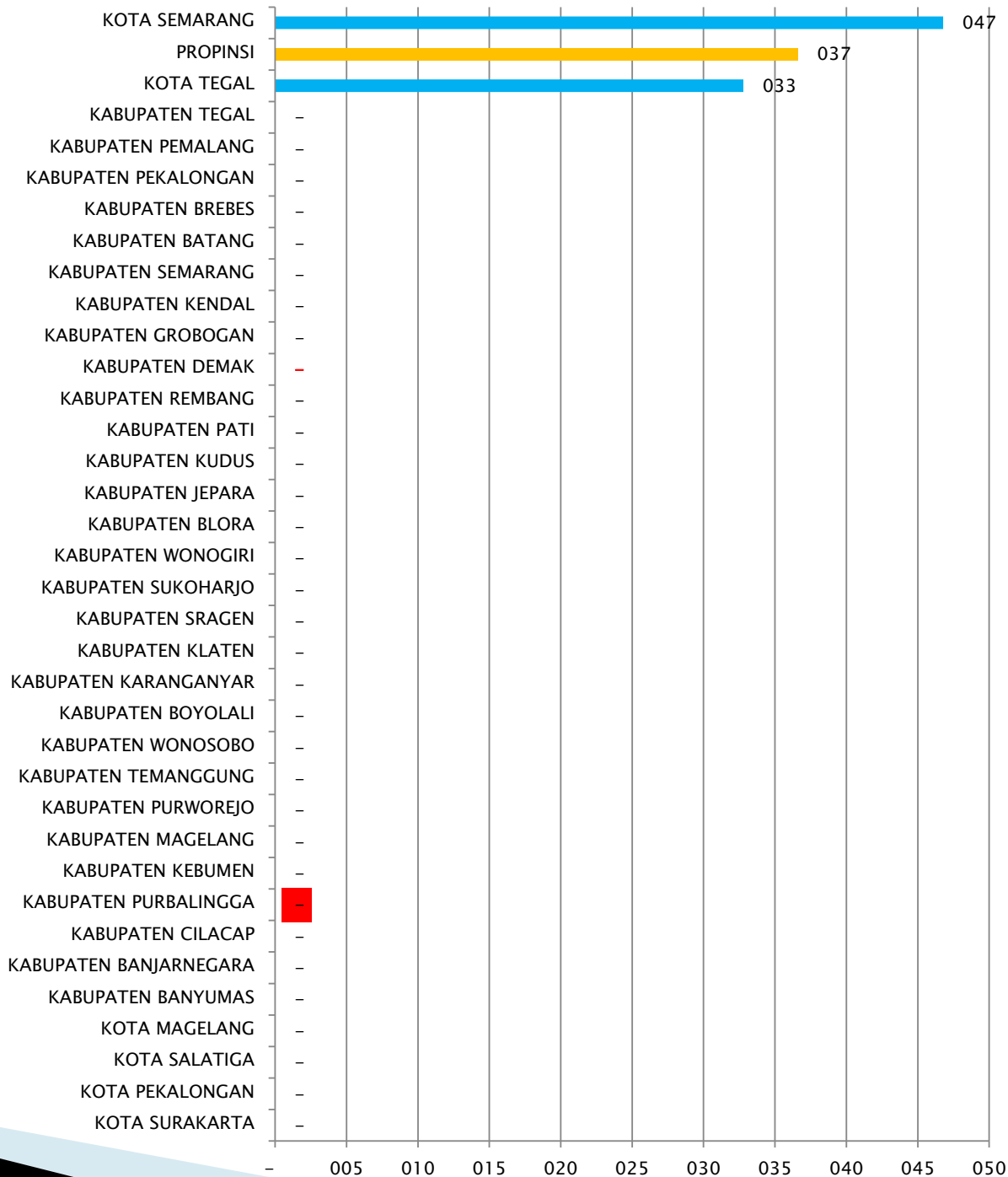
Grafik 19
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
Paket B/Wustha Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



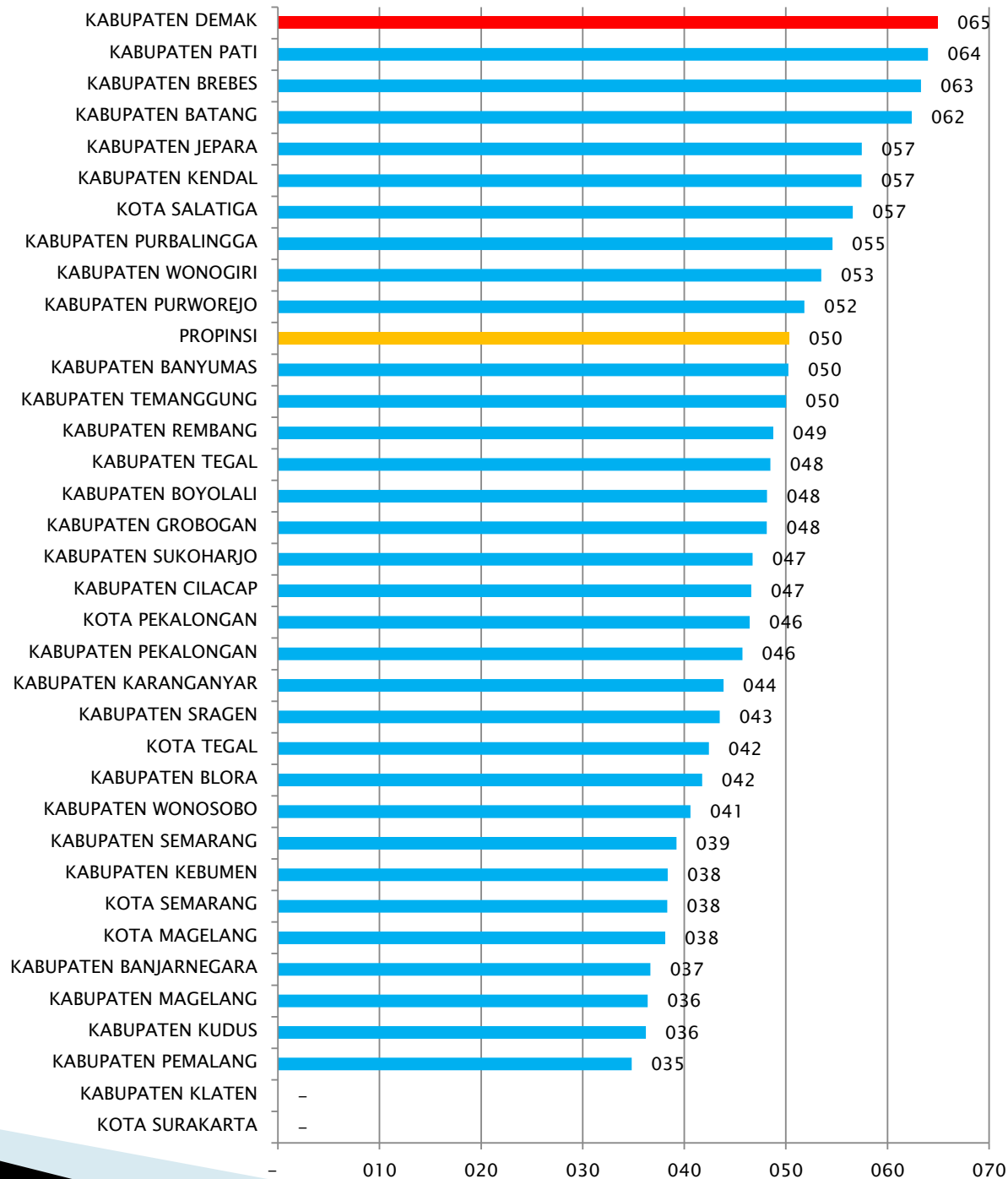
Grafik 20
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
Paket C IPA Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



Grafik 21
Rata2 Nilai UNBK dan UNKP
Paket C IPS Berdasarkan Peringkat
Prov. Jateng 2017

Sumber: Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



Tabel 1
Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok
Umur, Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat
Tinggal, 2015 Jawa Tengah

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15+	15-24	15-44	45+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan :				
Laki-laki	95,58	99,33	99,20	89,87
Perempuan	89,75	99,69	99,09	76,00
Laki-laki + Perempuan	92,60	99,51	99,15	82,63
Pedesaan :				
Laki-laki	91,74	99,07	98,76	81,69
Perempuan	82,59	99,25	98,13	61,52
Laki-laki + Perempuan	87,09	99,16	98,44	71,28
Perkotaan + Pedesaan :				
Laki-laki	93,60	99,20	98,98	85,53
Perempuan	86,08	99,47	98,61	68,40
Laki-laki + Perempuan	89,76	99,33	98,79	76,64

Sumber : SUPAS 2015.

Tabel 2
Jumlah penduduk dapat membaca dan menulis serta buta huruf Provinsi Jawa Tengah 2017

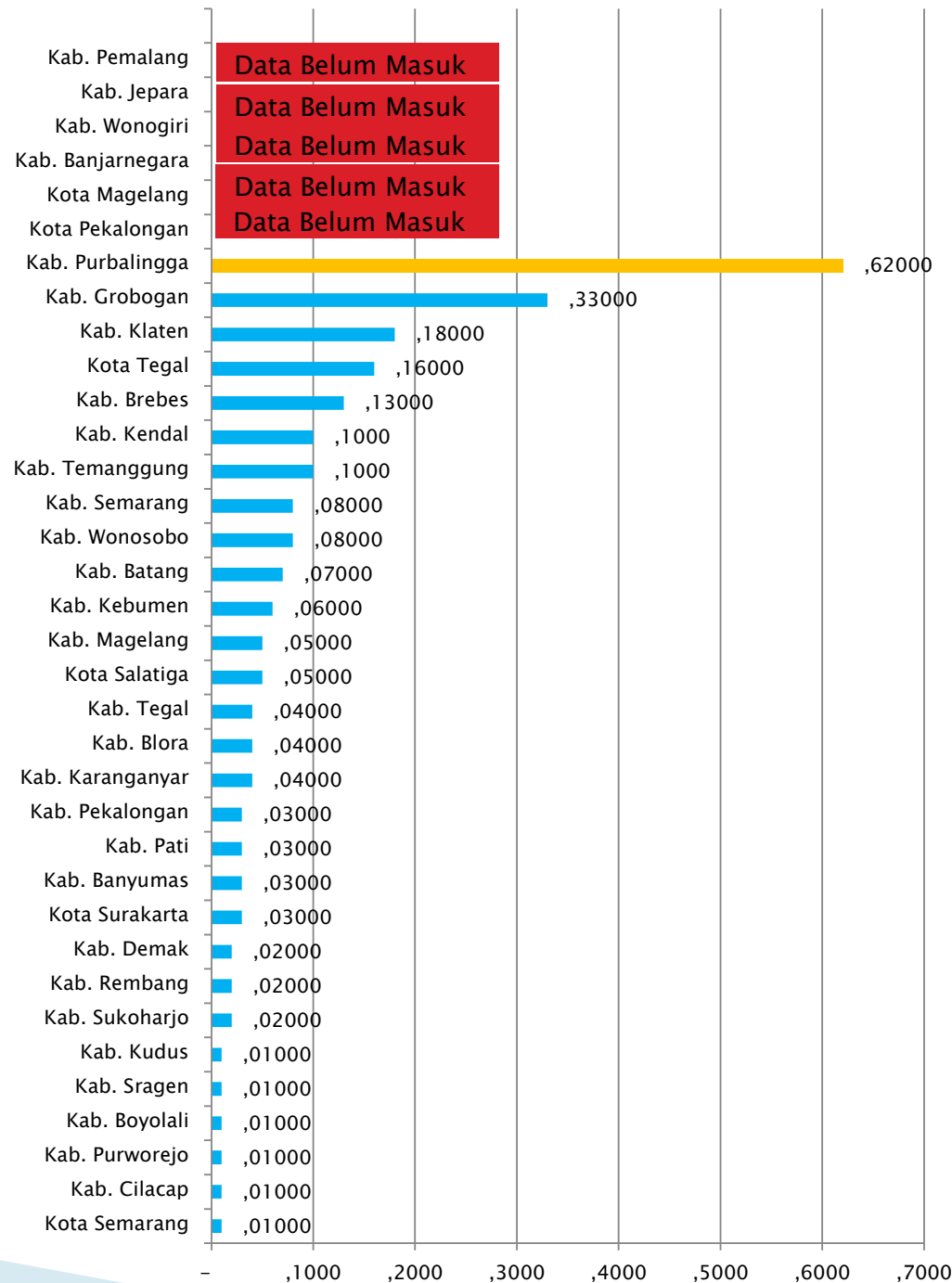
Sumber: profil.pdkjateng.go.id tahun 2017

Ket: Tanda kuning yang belum terisi di profil.pdkjateng.go.id

No	Kab/Kota	Dapat membaca	buta huruf
1	Kota Semarang	867,479	478
2	Kota Surakarta	552,930	–
3	Kota Tegal	276,264	470
4	Kota Pekalongan	288,064	2,283
5	Kota Salatiga	139,521	1,359
6	Kota Magelang	120,407	40
7	Kab. Banyumas	170,944	–
8	Kab. Banjarnegara	–	–
9	Kab. Cilacap	1,486,105	134,552
10	kab. Purbalingga	623,327	24,084
11	Kab. Kebumen	–	–
12	Kab. Magelang	928,447	672
13	Kab. Purworejo	708,038	–
14	Kab. Temanggung	459,942	8,908
15	Kab. Wonosobo	9,494	506
16	Kab. Boyolali	–	–
17	Kab. Karanganyar	818,785	19,977
18	Kab. Klaten	1,273,887	2,189
19	Kab. Sragen	617,083	59,988
20	Kab. Sukoharjo	862,003	24,612
21	Kab. Wonogiri	948,676	300
22	Kab. Blora	822,004	30,084
23	Kab. Jepara	1,127,283	17,633
24	Kab. Kudus	800	–
25	Kab. Pati	972,373	26,189
26	Kab. Rembang	619,095	–
27	Kab. Demak	1,100,000	461
28	Kab. Grobogan	1,295,289	117,036
29	Kab. Kendal	626,831	23,343
30	Kab. Semarang	672,739	166
31	Kab. Batang	3,931	–
32	Kab. Brebes	1,168,186	96,051
33	Kab. Pekalongan	308,202	599
34	Kab. Pemalang	1,270,862	8,734

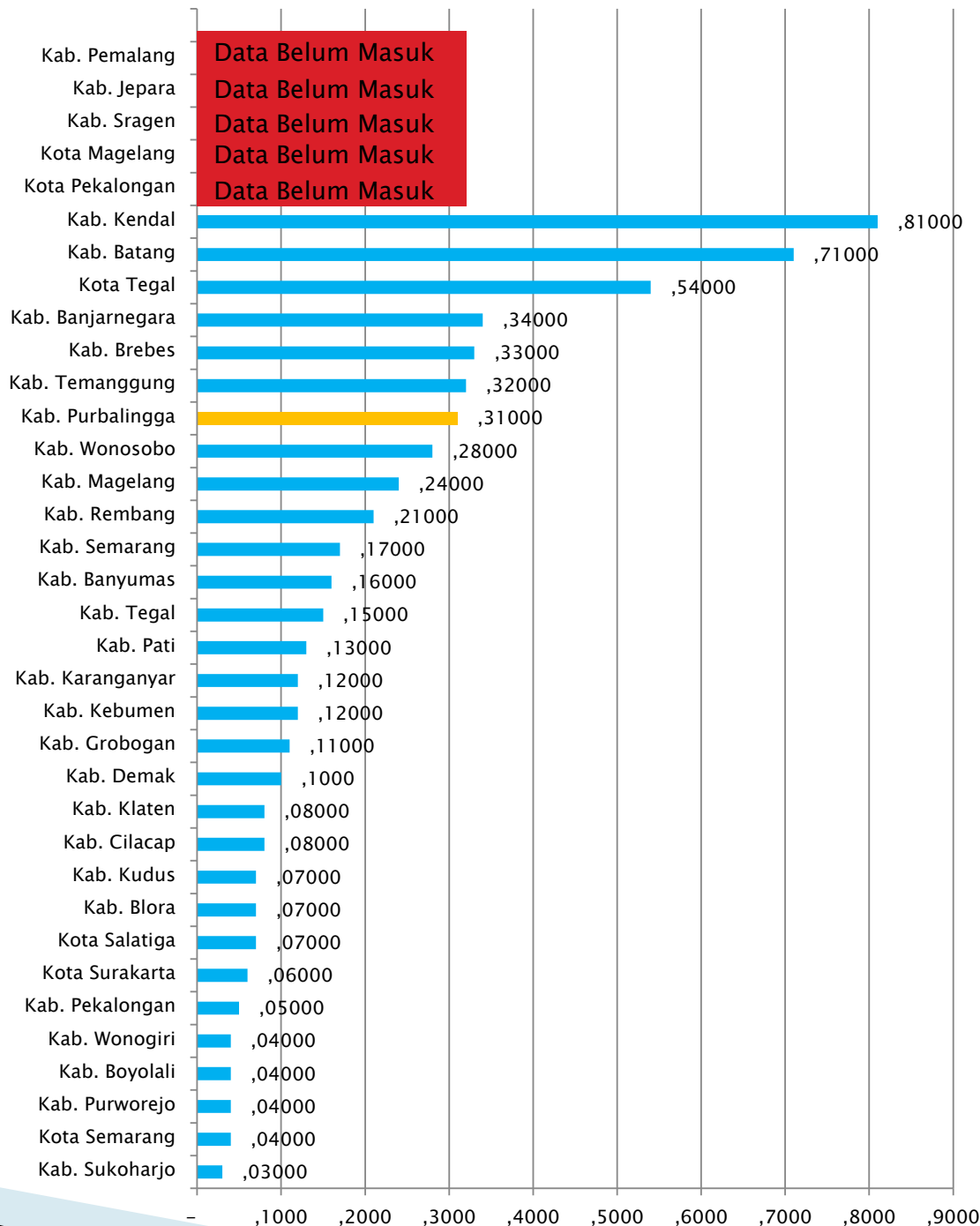
Grafik 22
Angka Putus Sekolah SD Berdasarkan
Peringkat Prov. Jateng 2017

*Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA,
 SMK profil.pdkjateng.go.id*



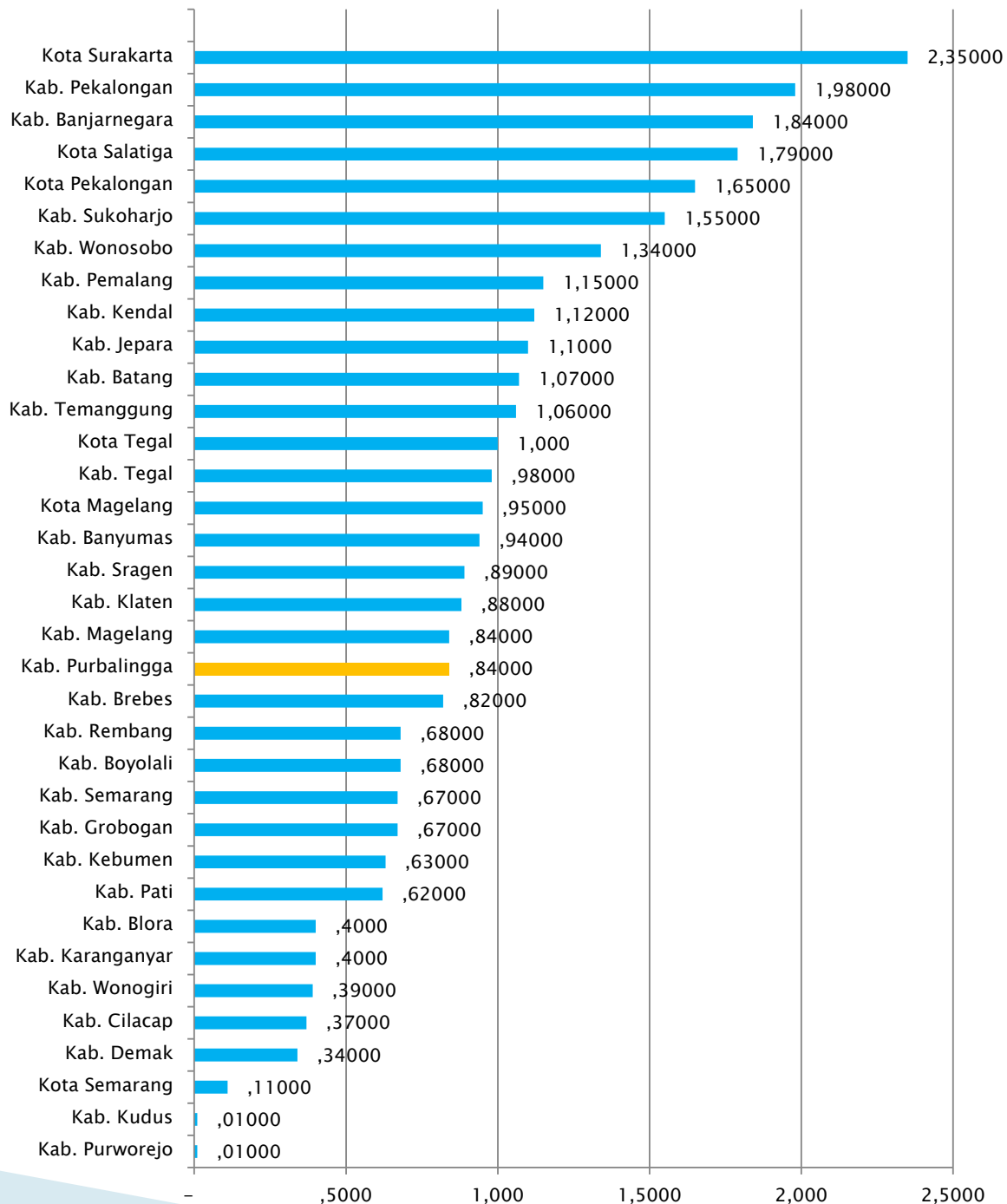
Grafik 23
Angka Putus Sekolah SMP Berdasarkan
Peringkat Prov. Jateng 2017

*Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA,
 SMK profil.pdkjateng.go.id*



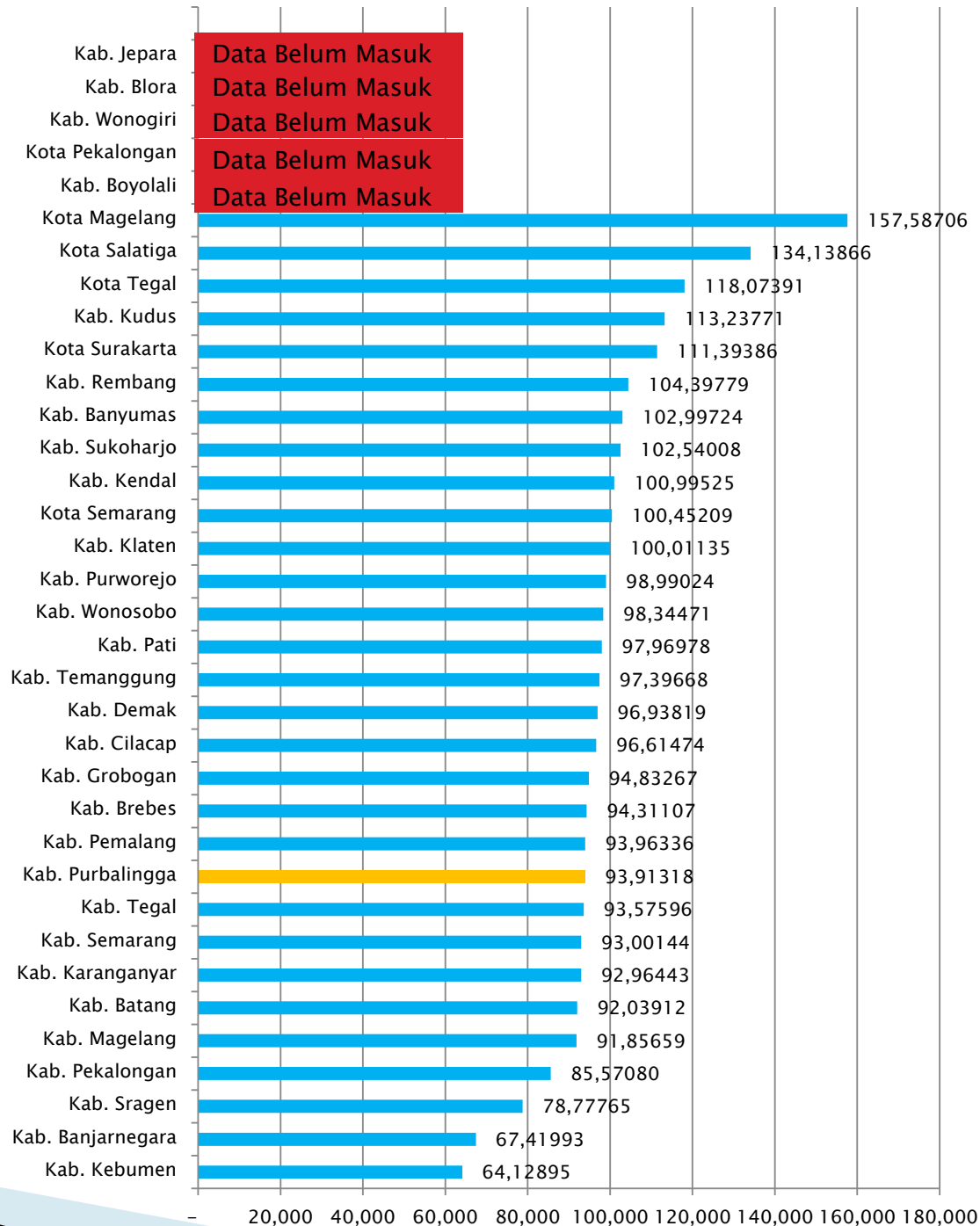
Grafik 24
Angka Putus Sekolah Menengah
Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017

*Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA,
 SMK profil.pdkjatang.go.id*



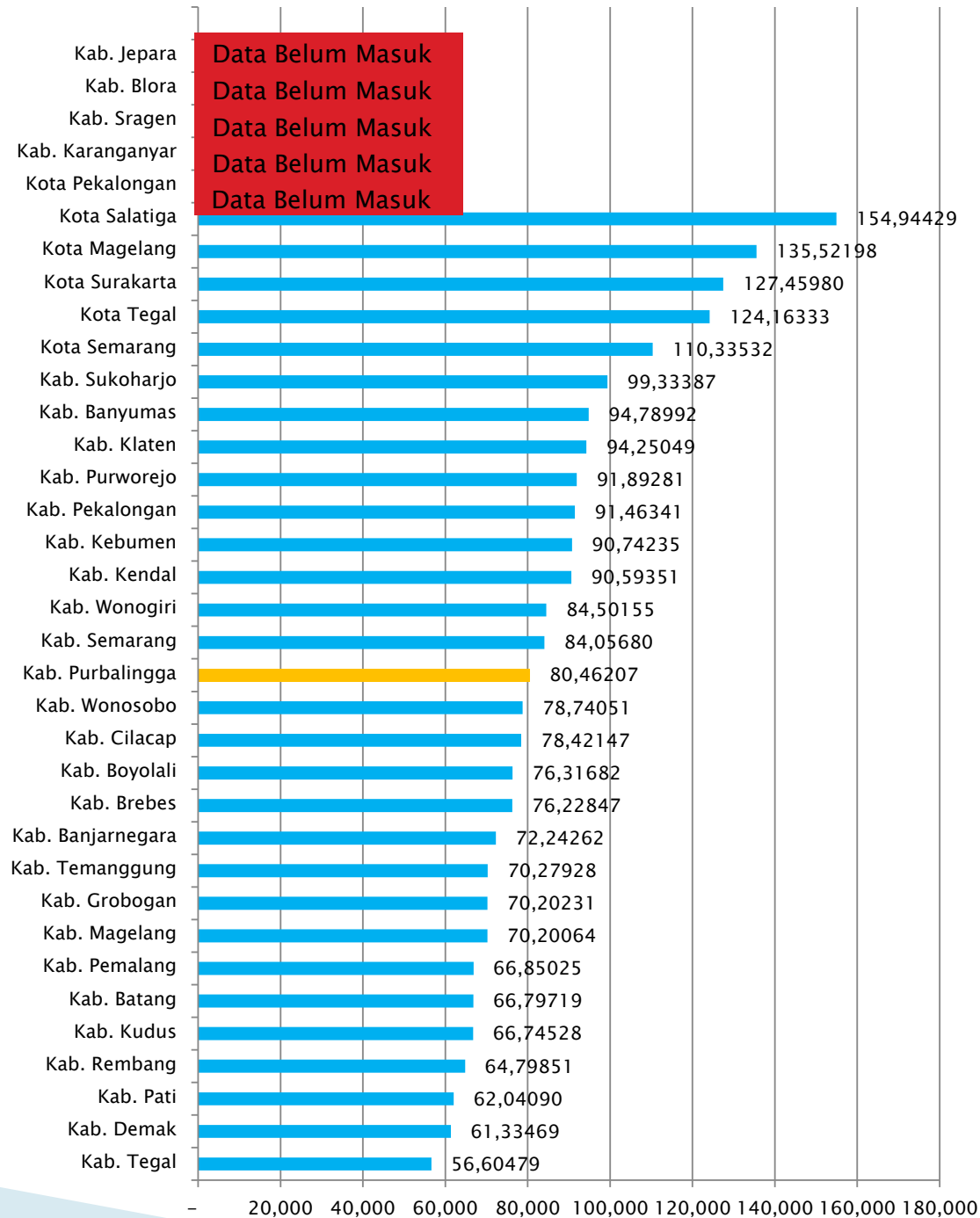
Grafik 25
Angka Melanjutkan SD Berdasarkan
Peringkat Prov. Jateng 2017

*Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA,
 SMK profil.pdkjateng.go.id*



Grafik 26
Angka Melanjutkan SMP Berdasarkan
Peringkat Prov. Jateng 2017

*Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA,
 SMK profil.pdkjateng.go.id*





TERIMA KASIH

SEMARANG, NOV 2017